

repository.ub.ac.id

STRATEGI PENGELOLAAN DESA WISATA DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

NAILI SHOLIAH
NIM. 145030101111030



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018

MOTTO

“ Kesuksesan bukanlah suatu akhir, kegagalan tidak berakibat fatal.

Keberanianlah yang akan terus berlanjut.”

(Winston Churchill)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pengelolaan Desa Wisata dan Kontribusi terhadap
Pendapatan asli Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Batu)

Disusun Oleh : Naili Sholihah

NIM : 145030101111030

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 5 Mei 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Hermawan, S.IP., M.Si

NIP. 19720405 200312 1 001



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juli 2018
Jam : 10.00 – 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Naili Sholihah
Judul : Strategi Pengelolaan Desa Wisata dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Batu)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Hermawan, S.IP., M.Si

NIP. 19720405 200312 1 001

Penguji I



Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP, MMG

NIP. 19810601 200501 1 005

Penguji II



Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP

NIP. 19840713 201504 1 004

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi yang berjudul **“Strategi Pengelolaan desa Wisata dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Batu)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 29 Juni 2018



Naili Sholihah

145030101111030



RINGKASAN

Naili Sholihah, 2018, **Strategi Pengelolaan Desa Wisata dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah** (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Batu), Dr. Hermawan, S.IP., M.Si, 182 Halaman

Desa Wisata adalah salah satu objek pariwisata unggulan di Kota Batu. Melihat potensi tersebut, Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata Kota Batu mencoba lebih mengeksplorasi dan mengelola desa wisata yang tersebar di Kota Batu dengan lebih baik. Fokus dari penelitian ini adalah strategi pengelolaan desa wisata dan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam strategi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, lokasi pada penelitian ini adalah Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu. Metode analisis interaktif data meliputi empat komponen yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Batu telah menerapkan beberapa strategi dalam pengelolaan Desa Wisata antara lain kesesuaian program dengan anggaran, promosi pariwisata, kemitraan dengan pihak swasta, dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Sedangkan untuk ketersediaan RIPPDA masih dalam tahap pembahasan dengan persiapan yang nantinya juga mengakomodir tentang desa wisata yaitu pemetaan potensi di tiap desa wisata, revitalisasi tim percepatan desa wisata, dan studi studi banding. Untuk dukungan regulasi masih lemah dan masih mengikuti Peraturan daerah tentang Kepariwisata. Kontribusi terhadap PAD Kota Batu melalui Pajak Hiburan Permainan Ketangkasan dan Pameran masing-masing sebesar 3,4% dan 1,8% pada tahun 2017. Faktor pendukung pengelolaan desa wisata yaitu letak geografis Kota Batu, tradisi budaya yang terjaga, keramahan penduduk desa wisata. Faktor penghambatnya yaitu sarana prasarana kurang memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berinovasi.

Dari hasil penelitian, saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain kerjasama dengan pihak sarana prasarana terkait dalam pelebaran bahu jalan dan kerjasama dengan pihak swasta untuk desa wisata yang mati suri, diadakannya kesempatan bagi relawan untuk melakukan pemberdayaan, pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat desa wisata untuk pengelolaan sampah dengan baik, serta pengawasan berkelanjutan terkait pengelolaan desa wisata.

Kata Kunci: strategi, kontribusi Pendapatan Asli Daerah

SUMMARY

Naili Sholihah, 2018, **Strategy of Village Tourism Management and Contribution to the Local Genuine Income** (Study at Dinas Pariwisata Kota Batu), Dr. Hermawan, S.IP., M.Si, 182 Pages

Tourism Village is one of the leading tourism objects in Batu City. Seeing this potential, Batu City Government through Batu Tourism Office tried to explore more and manage the tourism village spread in Batu City better. The focus of this research is the tourism village management strategy and its contribution to Local Genuine Income, and also the factors supporting and constraining the strategy.

The research method used is descriptive research with qualitative method. Location in this study is the Office of Tourism City of Batu. Interactive data analysis methods include four components of data collection, data condensation, data presentation, and conclusions.

Result of research indicate that Batu Tourism Office has implemented several strategies in the management of Tourism Village, such as the implementation of programs or activities based on available budget, the optimization of tourism promotion, partnership with private parties, and the development of tourism human resources. The availability of RIPPDA is still in the discussion phase with the preparation that will also accommodate the tourist village that is the potential mapping in every tourist village, the revitalization of village tourism acceleration team, and comparative study. For regulatory support is still weak and still follow the Local Regulations of Tourism. Contribution to Batu City's Local Genuine Income through the Entertainment and Games Tax is 3.4% and 1.8% respectively in 2017. Factors supporting the management of tourist villages are geographical location of Batu City, cultural traditions are maintained, hospitality of the villagers tourism. Constraining factors are inadequate infrastructure and lack of public awareness to innovate.

From the research result, the suggestion that can be given by the researcher is cooperation with the related infrastructure facilities in widening the shoulder of the road and cooperation with the private parties for the deserted tourist village, holding the opportunity for the volunteers to do the empowerment, training or socialization to the village tourist community for good waste management, and ongoing supervision related to the management of tourist village.

Keywords: strategy, Local Genuine Income Contribution

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan ini penulis persembahkan karya ini untuk :

TERISTIMEWA KEDUA ORANGTUAKU DAN KAKAK-KAKAKKU, YANG
TERHORMAT TERSAYANG, DAN TERKASIH.
SERTA SEMUA SAHABAT - SAHABATKU



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pengelolaan Desa Wisata dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam melakukan ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan ide, kemampuan, kemauan, kerja keras, dan semangat serta semua rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak, ibu, kakak, serta keluarga peneliti yang telah memberikan doa, dukungan serta restunya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

4. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, PhD selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi.
5. Bapak Dr. Fadillah Amin, MAP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi.
6. Bapak Dr. Hermawan, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta memberikan masukan pada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
7. Ibu Dhien Hisyam selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Batu.
8. Ibu Caterina Diana selaku Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Dinas Pariwisata Kota Batu.
9. Bapak Syaiful Rochani selaku Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Batu.
10. Bapak Mustakim Wardi'i selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Pelatihan.
11. Ibu Eliani Pristiningsih selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Batu.
12. Pihak-pihak dari Dinas Pariwisata Kota Batu dan Badan Keuangan Daerah yang terlibat dan turut membantu pada saat proses penelitian.
13. Sahabat terdekat penulis, terkhusus untuk Reinaldi yang telah mendukung dan membantu semua proses penyusunan skripsi ini. Serta tak lupa teman-teman terdekat saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2018

Peneliti



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kontribusi Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik.....	18
1. Pengertian Administrasi Publik	18
2. Fungsi Administrasi Publik	21
B. Pemerintah Daerah	22

1. Pengertian Pemerintah Daerah	22
2. Desentralisasi	23
3. Otonomi Daerah	25
C. Keuangan Daerah (<i>Local Government Finance</i>).....	27
1. Pengertian Keuangan Daerah	27
2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	28
3. Sumber-Sumber Keuangan Daerah	28
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	30
D. Strategi.....	32
1. Pengertian Strategi.....	32
2. Tipe-Tipe Strategi.....	34
3. Syarat-Syarat Strategi	35
4. Manajemen Strategi	36
5. Strategi Pengelolaan Pariwisata.....	38
E. Pariwisata	39
1. Pengertian Pariwisata	39
2. Jenis Pariwisata	40
3. Dampak Pariwisata.....	42
4. <i>Community Based Tourism</i>	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Instrumen Penelitian	52
G. Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Gambaran Umum Kota Batu.....	58
a. Kondisi Geografis Kota Batu	59
b. Kondisi Pemerintahan Kota Batu	60
c. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja.....	61
d. Kondisi Pariwisata di Kota Batu	63
2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Batu.....	64
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	64
b. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Batu	71
c. Tujuan Dinas Pariwisata Kota Batu	72
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	73
1. Strategi Pengelolaan Desa Wisata.....	73
a. Penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	74
b. Penyiapan Program atau Kegiatan Sesuai dengan Kebutuhan	76

c. Pengoptimalisasian Promosi Pariwisata	80
d. Dukungan Regulasi	82
e. Kemitraan dengan Swasta	83
f. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	85
2. Kontribusi Desa Wisata terhadap PAD	88
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Desa Wisata di Kota Batu	92
a. Faktor Pendukung	92
b. Faktor Penghambat	96
C. Analisis Data	99
1. Strategi Pengelolaan Desa Wisata	99
a. Penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	100
b. Penyiapan Program atau Kegiatan Sesuai dengan Kebutuhan	101
c. Pengoptimalisasian Promosi Pariwisata	103
d. Dukungan Regulasi	106
e. Kemitraan dengan Swasta	107
f. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	109
2. Kontribusi Desa Wisata terhadap PAD	111
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Strategi Pengelolaan Desa Wisata Kota Batu	113
a. Faktor Pendukung	113
b. Faktor Penghambat	116
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	126

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Desa Wisata di Kota Batu	8
2. Jumlah Pengunjung Kampung Wisata Kungkuk dengan Wisata Artifisial Lain di Kota Batu	10
3. Luas Wilayah Kota Batu menurut Kecamatan 2016.....	60
4. Daftar Pokdarwis Desa Wisata Kota Batu	87
5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu Kategori Pajak Hiburan Permainan Ketangkasan	89
6. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu Kategori Pajak Hiburan Pameran.....	90
7. Data Pembayaran Obyek Pajak Hiburan 2016.....	91
8. Data Pembayaran Obyek Pajak Hiburan 2017	91



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Jumlah Kunjungan di Objek Wisata Kota Batu	7
2. Analisis Model Interaktif	57
3. Peta Kota Batu	58
4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu	67
5. Kampung Wisata Kungkuk Desa Punten Kota Batu	73
6. Obyek Wisata Coban Rais di Desa Wisata Oro-Oro Ombo Kota Batu	74
7. Papan Selamat Datang yang Baru Saja Dibangun di Kampung Wisata Kungkuk.....	78
8. Gazebo yang tidak terawat di Kampung Wisata Kungkuk	79



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Daftar Wawancara.....	126
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu	127
3. Surat Izin Riset/ <i>Survey</i>	128
4. Surat Persetujuan Riset Dinas Pariwisata Kota Batu	129
5. Surat Persetujuan Riset Badan Keuangan Daerah	130



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang saat ini sedang serius diperhatikan dan dikembangkan oleh negara-negara di dunia dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Kerr (2003:3) mengungkapkan bahwa *“in the latter part of 20th century, tourism emerged as the world’s fastest growing industry to a position it looks set to sustain well into the 21th century, and beyond.”* Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa industri pariwisata merupakan salah satu industri yang berkembang secara pesat di abad ini, dan masih akan bertahan sampai abad mendatang, salah satunya juga Indonesia. Indonesia memiliki potensi wisata yang besar karena merupakan sebuah negara kepulauan luas, yang wilayahnya membentang dari Sumatera sampai Papua. Luas daratan Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia (2012) ialah 1.910.931,32 Km², dengan kekayaan kebudayaan dan kesenian masyarakatnya, dan keindahan alamnya yang menjadi daya tarik sendiri. Dengan kondisi tersebut, maka potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia merupakan penggerak perekonomian nasional yang potensial untuk memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Selain dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata juga dianggap mampu mengatasi

beberapa permasalahan seperti pengentasan kemiskinan, dan mengurangi jumlah pengangguran.

Meski pariwisata bukan prioritas utama sebagai sasaran pembangunan ekonomi, namun dengan adanya sektor pariwisata yang terus dikembangkan akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Dicevska dan Simonceska (2012) menyatakan, “...*tourism provides about 10% of the world's income and employs almost one tenth of the world's workforce. All considered tourism's actual and potential economic impact is astounding.*” Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pariwisata menyediakan sekitar 10% dari pendapatan dunia dan mempekerjakan hampir sepersepuluh dari angkatan kerja dunia. Menurut Soebagyo (2012: 154), ada empat bidang pokok yang dipengaruhi oleh usaha pengembangan pariwisata yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Salah satu dampak positif yang menguntungkan dalam bidang ekonomi adalah kegiatan pariwisata yang mendatangkan pemasukan negara. Di samping itu, sektor pariwisata dapat dioptimalkan untuk mendorong berjalannya kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar obyek wisata. Menurut Joyosuharto (1995), pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu menggalakkan ekonomi, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, dan memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti

pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan. Kawasan pariwisata yang dikelola secara baik akan meningkatkan keuntungan serta mendatangkan wisatawan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga daerah yang memiliki obyek wisata tersebut akan mengalami perkembangan yang pesat dibidang pariwisata maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah tidak cukup hanya membuat peraturan namun harus mampu mengembangkan dan mengelola pariwisata di daerah yang terpencil.

Menurut Biduan (2015:13) secara langsung dampak yang dirasakan daerah destinasi wisata adalah melalui pendapatan asli daerah. Pada umumnya objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah akan menarik retribusi bagi wisatawan yang berkunjung dan ingin menikmati objek maupun daya tarik wisata beserta fasilitas yang ditawarkan. Sudah dapat dipastikan bahwa sektor pariwisata bisa menjadi salah satu sumber penghasilan pendapatan asli daerah. Selain itu pendapatan pemerintah daerah yang bisa ditarik dari sektor pariwisata adalah bersumber dari pengenaan pajak.

Dapat dikatakan pariwisata memiliki potensi yang besar bagi pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi pariwisata dengan cara pengelolaan yang baik, serta mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif bagi terselenggaranya potensi pariwisata di daerah. Selain peran masyarakat pemerintah juga harus bekerja sama dengan swasta agar pengelolaan pariwisata menjadi optimal.

Berdasarkan peluang tersebut, pemerintah perlu memberikan kewenangan bagi tiap-tiap daerah karena potensi yang ada di tiap daerah sejatinya memiliki peluang pariwisata yang besar jika mampu dikelola dengan baik. Menurut Kuncoro (2014:3) bahwa desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atas kepada daerah dibawahnya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa terjadi pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom. Dalam tradisi Anglo-Saxon, desentralisasi berarti proses politik yang luas yang terdiri dari “devolusi sumber daya dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke badan pembuat keputusan lokal atau swasta”, dalam pandangan ini, pelaku desentralisasi lokal adalah lembaga pemerintah daerah, masyarakat, LSM, koperasi, asosiasi dan sektor swasta (Ouedraogo, 2003). Pembagian wewenang atau biasa disebut otonomi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjabarkan urusan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah yang membuat daerah berhak atau berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah mampu berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah bersangkutan.

Pemerintah daerah setempat memilih langsung urusan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dimana hal tersebut telah diatur dalam perundang-undangan. Otonomi daerah digunakan daerah untuk mengembangkan segala sumber daya yang ada di daerah serta sebagai pembangun daerah bersangkutan. Sebagaimana tertulis dalam pasal 258 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di daerah:

1. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
2. Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintah yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Ada delapan urusan pemerintah daerah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana salah satunya mengenai urusan pilihan Pariwisata yang saat ini dianggap sebagai salah satu sektor pendukung pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan membuat daerah menjadi lebih mandiri dan mampu bersaing dengan daerah sekitarnya. Pembangunan daerah juga sebagai acuan suatu negara sudah memiliki potensi yang selain dapat mengembangkan daerah bersangkutan juga dapat membantu pembangunan nasional.

Menghadapi tantangan dan peluang ini, dilakukan perubahan peran pemerintah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang pada masa lalu berperan sebagai pelaksana pembangunan, saat ini lebih difokuskan hanya pada tugas-tugas pemerintahan terutama sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan dapat berkembang pesat. Peran fasilitator dapat diartikan menciptakan iklim yang nyaman agar peran pelaku kegiatan kebudayaan dan pariwisata dapat berkembang secara efisien dan efektif. (Indonesia.go.id)

Potensi suatu desa wisata atau wisata pedesaan tidak kalah dengan wisata alam lainnya ataupun wisata buatan lainnya. Bramwell dan Lane dalam Kamat (2011) mengatakan, wisata pedesaan mencakup banyak aktivitas yang bisa dilakukan dan tidak hanya pariwisata berbasis pertanian. Aktivitas ini dapat meliputi wisata minat khusus alam dan ekoturisme, *walking*, memanjat dan menunggangi kuda atau bersepeda, petualangan, olah raga dan wisata kesehatan, berburu dan memancing, perjalanan pendidikan, seni, dan wisata sejarah, serta kawasan wisata etnis. Selain itu Subash, Smitha, Klaus (2009) dalam Kamat (2011), kembali memperkuat kenyataan bahwa pariwisata desa atau desa wisata bertindak sebagai peremajaan karena membawa stagnasi atau penurunan tahap industri pariwisata kembali ke tahap pertumbuhan industri pariwisata yang kedua/selanjutnya. Hal ini karena, menurut mereka wisata pedesaan memiliki karakteristik yang melekat untuk menjadi konsep pariwisata berkelanjutan begitu dikembangkan dan dikelola dengan baik.

Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang sudah terkenal dengan beragam obyek wisatanya. Kota Batu terbukti mampu mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya baik yang ada di pusat kotanya maupun potensi wisata yang tersembunyi di pinggiran seperti halnya di desa-desa. Hal ini terbukti dari tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung dan mampu menembus angka diatas 100.000 pengunjung di tiap bulannya. Hal ini bisa dilihat dengan gambar berikut.



Gambar 1. Jumlah Kunjungan di Objek Wisata Kota Batu

Sumber : Kota Batu dalam Angka 2017

Saat ini terdapat 14 desa wisata di Kota Batu yang dapat menjadi tujuan para wisatawan domestik maupun asing, antara lain Desa Tulungrejo, Desa Punten, Desa Oro-Oro Ombo, Desa Gunungsari, Desa Sidomulyo, dan yang lainnya. Setiap desa memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan dengan desa wisata lainnya. Masyarakat di tiap desa tersebut berkeaktifitas untuk menonjolkan potensi keunikan yang ada di desanya, sehingga daya saing antara desa satu dengan desa yang lain dapat dikategorikan bersaing dengan baik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Desa Wisata di Kota Batu

No	Nama	Kecamatan	Produk Unggulan
1	Kampung Wisata Tani Temas	Batu	Kampung wisata ekologi dan wisata pertanian organik
2	Desa Wisata Kungkuk	Bumiaji	Petik jeruk
3	Desa Wisata Tulungrejo	Bumiaji	Petik apel
4	Desa Wisata Bumiaji	Bumiaji	Petik apel, jeruk, jambu
5	Desa Wisata Sidomulyo	Batu	Wisata bunga hias
6	Desa Wisata Oro-Oro Ombo	Batu	Sayur
7	Desa Wisata Sumberjo	Batu	Sayur organik
8	Desa Wisata Gunungsari	Bumiaji	Petik bunga potong
9	Kampung Kelinci Bulukerto	Bumiaji	Ternak kelinci
10	Desa Wisata Pandanrejo	Bumiaji	Petik <i>strawberry</i>
11	Desa Wisata Torongrejo	Junrejo	Sayur
12	Desa Wisata Tlekung	Junrejo	Sayur dan Buah
13	Desa Wisata Junrejo	Junrejo	Wisata <i>handycraft</i>
14	Desa Wisata Songgokerto	Batu	Minat khusus

Sumber: Printout Potensi Wisata, Dinas Pariwisata Kota Batu 2017

Salah satu desa wisata yang sudah cukup lama berdiri adalah Kampung Wisata Kungkuk (KWK) yang berada di Dusun Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji. KWK berdiri pada tahun 2007 dengan wilayah pengembangan Desa Punten ini difokuskan pada Dusun Kungkuk yang akhirnya

dibentuklah suatu alternatif tempat wisata yaitu Kampung Wisata Kungkuk (KWK).

KWK muncul dari inisiatif masyarakat di Desa Punten. Mereka menyadari akan potensi yang ada di desanya sehingga mereka memiliki inisiatif untuk memberdayakan apa yang mereka miliki seperti rumah, pertanian, dan potensi alam yang terdapat di lingkungan desa mereka. Selain itu, faktor pendukung dalam pengembangan KWK yaitu kondisi dan letak geografis desa Punten yang berada di perbukitan dengan pemandangan yang indah serta udara yang masih sejuk.

Selain menghadirkan pesona alam menakjubkan, kampung wisata ini juga sangat cocok bagi penggemar *outbond*, perkemahan, *flying fox*, olahraga gunung, sepeda gunung, mobil gunung, dan lain-lain. Berdasarkan pengamatan peneliti, kampung wisata ini menyediakan dua area *camping* dan *outbond*. Pertama, terletak di samping gazebo dengan panorama alam yang lebih terbuka. Selain itu, wisatawan juga bisa menikmati keindahan alam Kampung Wisata Kungkuk sambil berkuda dengan harga yang terjangkau

Dari sebelah utara, pengunjung bisa menikmati paket wisata petik apel. Dari sebelah selatan terdapat paket wisata petik jeruk. Di sebelah barat, pengunjung bisa menikmati paket wisata sekolah alam tentang cara menanam, merawat, dan memanen tanaman. Sedangkan sebelah timur terdapat *homestay* dan perkampungan penduduk. Selain menikmati panorama alamnya, traveler juga

dapat belajar beberapa adat budaya dan ciri khas Desa Punten seperti atraksi Tari Santar, kuda lumping, dan bantengan.

Namun ada beberapa masalah ditemukan di dalam pengelolaan KWK, salah satunya adalah minimnya wisatawan yang berkunjung ke KWK. Masih banyak para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu hanya karena ingin mengunjungi tempat wisata artifisial atau buatan seperti Jatim Park I, Eco Green Park, dan lain sebagainya. Padahal desa wisata seperti Kampung Wisata Kungkuk juga tidak kalah menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Para wisatawan masih belum mengenal tempat-tempat wisata di pedesaan seperti halnya Kampung Wisata Kungkuk. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2. Jumlah Pengunjung Kampung Wisata Kungkuk dengan Wisata Artifisial Lain di Kota Batu 2016

No	Tempat Wisata	Jumlah Kunjungan (orang)
1	Selecta	1077114
2	Batu Night Spectacular (BNS)	253151
3	Museum Angkut	230427
4	Jatim Park	159582
5	Eco Green Park	52122
6	Kampung Wisata Kungkuk	13636

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2017

Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya promosi, publikasi dan pelayanan yang masih minim dari para pengelola KWK. Minimnya sarana dan prasarana dalam area wisata Kungkuk untuk memfasilitasi para wisatawan yang berkunjung juga menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan baik oleh Kepengelolaan KWK maupun pemerintah desa dan dinas terkait. Hal ini

mengingat lokasi KWK yang masih susah untuk dijangkau, dikarenakan kondisi geografisnya yang berada pada dataran tinggi yaitu berada pada ketinggian 950 mdpl dan diapit oleh Gunung Panderman di sebelah selatan serta Gunung Arjuno di sebelah utara sehingga harus melalui jalan yang berkelok-kelok. Kelengkapan fasilitas seperti peralatan outbond, berkuda dan sebagainya juga sangat penting untuk diperhatikan supaya dapat menarik wisatawan yang berkunjung ke KWK.

Selain Kampung Wisata Kungkuk, salah satu desa wisata yang dapat dijadikan citra dari Kota Batu adalah obyek wisata petik apel yang berada di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji. Di desa ini sedikitnya terdapat 10 kelompok petani petik apel yang sudah memiliki izin resmi dari Dinas Pariwisata Kota Batu. Kelebihan obyek wisata petik apel ini menawarkan suasana alam yang ada di pedesaan dan nuansa alami. Wisatawan juga dapat memakan apel di dalam kebun apel dengan menikmati pemandangan alam yang indah karena perkebunan apel dikelilingi oleh pegunungan yang memiliki panorama asri (www.republika.co.id). Selain itu obyek wisata air terjun yaitu Coban Talun juga terletak di desa ini sehingga menambah daya tarik bagi pengunjung desa ini.

Akan tetapi, dalam mengembangkan desa wisata Tulungrejo saat ini masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan pengamatan peneliti, belum memadainya infrastruktur di desa ini seperti akses jalan yang masih sempit untuk dilalui kendaraan besar, sumber daya manusia pengelola obyek wisata petik apel yang masih rendah, serta belum adanya kesiapan masyarakat dengan adanya desa wisata. Untuk infrastruktur jalan masih lebih diutamakan akses jalan menuju obyek wisata air terjun Coban Talun. Hal ini lah yang menyebabkan wisatawan

lebih mengenal Coban Talun daripada desa wisata Tulungrejo itu sendiri. Hal ini juga terjadi di desa wisata Oro-Oro Ombo, dimana wisatawan lebih mengenal obyek wisata Coban Rais daripada desa itu sendiri.

Pemerintah Kota Batu melakukan upaya serta tahapan strategis di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan daerah yang lebih baik lagi. Salah satu yang diperhatikan yaitu dengan menarik para investor baik lokal regional, nasional, maupun global yang tertarik untuk membangun kawasan menjadi suatu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Karena dengan semakin banyaknya investor yang turut serta di dalam suatu daerah, maka pendapatan di daerah tersebut akan meningkat sehingga pembangunan daerah tersebut berhasil dan dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Selain itu peluang yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan mengintensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah baru. Salah satu upaya Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah melalui pajak, retribusi, dan dari sektor pariwisata. Senada dengan hal tersebut, Dyah (2012) menyebutkan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan syarat pokok dalam arti sumber daya yang sangat menentukan dalam usaha mengembangkan pemerintah daerah. Oleh karena itu intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber-sumber keuangan daerah di bidang perpajakan dan retribusi daerah merupakan usaha yang harus selalu ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melihat berapa besar kontribusi desa wisata yang tersebar cukup banyak di Kota Batu terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dan dengan mengutamakan produk lokal daerah serta

kemampuan masyarakat dalam mengembangkan desanya tanpa bantuan dari investor.

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu tugas dari pemerintah setempat yang diamanatkan kepada Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai instansi terkait mengenai pariwisata di Kota Batu. Dinas Pariwisata Kota Batu memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu, dengan dibantu oleh bagian pariwisata yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan obyek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata. Oleh karena itu, diharapkan pariwisata pedesaan di Kota Batu dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik serta berkontribusi dalam pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis, maka penulis tertarik untuk mengetahui permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Desa Wisata dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Batu)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah strategi pengelolaan Desa Wisata di Kota Batu?
2. Berapa besar kontribusi Desa Wisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan Desa Wisata?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengelolaan Desa Wisata di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi objek Desa Wisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan Desa Wisata.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak:

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan teori kepada mahasiswa dan peneliti lain mengenai peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pariwisata, serta mampu memberikan kontribusi kepada pengembang disiplin Ilmu Administrasi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kota Batu untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan pariwisata.

3. Bagi peneliti

Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan dalam berfikir.

4. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan-bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti terdahulu dan sebagai referensi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang mengemukakan alasan peneliti melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian mengenai potensi pariwisata yang dimiliki

oleh Kota Batu sehingga mampu dikelola dengan baik apabila mampu menggunakan strategi yang tepat khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang dipakai penulis yang berkaitan dengan permasalahan dan membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Teori yang diambil dapat dijadikan pedoman penulis untuk melakukan penelitian. Teori-teori yang dipakai oleh penulis meliputi teori administrasi publik, pemerintah daerah, keuangan daerah, strategi, kepariwisataan, dan hubungan pariwisata dengan pendapatan asli daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan, dimana membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan, lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data. Metode penelitian yang diambil peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan analisis data Miles, Huberman, dan sebagai pembantu pembahasan dalam penulisan skripsi.

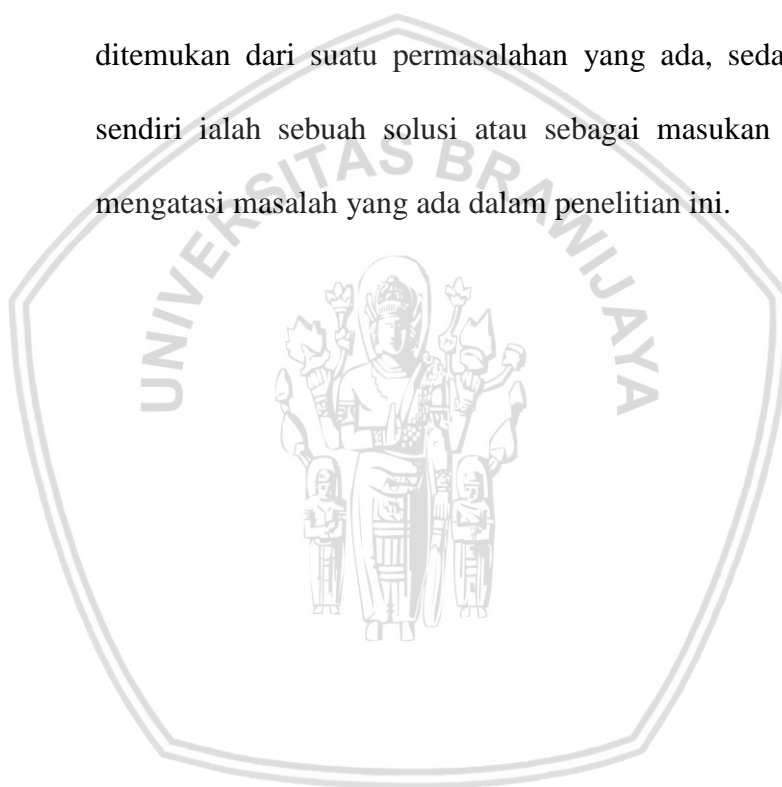
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam isi bab ini terdapat data-data yang diperoleh peneliti dari peneitian ini yang berupa penyajian data yang telah diperoleh dari permasalahan yang dibahas dan tercantum di dalam fokus

penelitian ini. Kemudian data yang didapat tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Dalam isi bab ini merupakan bab yang dimana terdapat 2 sub pokok bahasan yaitu kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan itu merupakan sekilas hasil penelitian yang terangkum dapat ditemukan dari suatu permasalahan yang ada, sedangkan saran sendiri ialah sebuah solusi atau sebagai masukan untuk dapat mengatasi masalah yang ada dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Chandler dan Plano (1998: 29-30) mengartikan administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sesungguhnya administrasi publik juga sebagai seni dan ilmu (*art and sciense*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Sementara menurut Owen Hughes (2004:23) mendefinisikan administrasi publik sebagai studi akademik tentang sektor publik. Dalam hubungan pengertian ini administrasi publik di pandang sebagai manajemen pengembangan teknologi modern menuju *modern governance*. Suatu buku teks yang sangat komphrehensif yaitu “Handbook of Public Administration” oleh James L. Perry (editor, 1989) menguraikan unsur-unsur pokok ruang lingkup administrasi publik sebagai berikut:

- a. Tantangan-tantangan administrasi publik dan bagaimana administrasi publik seharusnya menyesuaikan diri.
- b. Sistem administrasi dan organisasi yang efektif.
- c. Usaha memperkuat hubungan dengan badan legislatif, badan-badan yang diangkat atau dipilih, dan dengan masyarakat.
- d. Bagaimana menyusun kebijakan dan program-program secara sukses.
- e. Administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif.
- f. Manajemen sumber daya manusia.
- g. Memperbaiki operasi dan pelayanan publik, dan
- h. Praktek administrasi publik yang profesional dan etis

Variasi makna administrasi dapat dilihat juga dari persepsi orang tentang kata “administrasi publik” itu sendiri. Ada yang menerjemahkan administrasi publik sebagai *administration of public* atau administrasi dari publik, ada yang *administration for public* atau administrasi untuk publik, bahkan ada yang melihatnya sebagai *administration by public* atau administrasi oleh publik. Variasi terjemahan tersebut menarik karena dapat menunjukkan suatu rentangan kemajuan administrasi publik mulai dari administrasi publik yang berparadigma paling tidak memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat sampai ke yang benar-benar memperlihatkan pemberdayaan masyarakat. Menurut Keban, istilah *administration of public* yaitu menunjukkan peran pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengalami langkah dan prakarsa, yang menuntut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah” (Keban, 2008:4).

Kemudian istilah administrasi untuk publik menunjukkan suatu konteks yang lebih maju yaitu pemerintah lebih berperan dalam mengemban

misal pemberian pelayanan publik (*service provider*). Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih berperan dengan responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Istilah *administration by public* merupakan konsep yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, yang lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberikan kesempatan. Menurut Russel (1997) yang dikutip oleh Keban (2008:6) berpendapat bahwa definisi administrasi dibagi menjadi empat kategori yaitu kategori legal, politik, manajerial, dan mata pencaharian.

Berdasarkan kategori politik, administrasi publik sebagai "*what government does*", yang menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahap siklus pembuatan kebijakan publik, sebagai implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan oleh individu. Berdasarkan kategori legal administrasi publik dilihat sebagai penerapan (*law in action*). Berdasarkan kategori manajerial, administrasi publik dipandang sebagai fungsi eksekutif dalam pemerintahan. Dalam kategori mata pencaharian, administrasi merupakan suatu bentuk profesi.

Dari semua batasan ini, beberapa makna penting yang harus diingat berkenaan dengan hakikat administrasi publik yaitu:

- a. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan legislatif dan yudikatif.
- b. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik.
- c. Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah.
- d. Bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi *overlapping* dengan administrasi swasta.
- e. Bidang tersebut diarahkan ntuk menghasilkan *public goods and service*.
- f. Bidang ini memiliki dimensi teoritis dan praktis.

Dari beberapa pengertian administrasi publik diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu bentuk kerja sama yang dilakukan baik sekelompok orang ataupun lembaga yang terkoordinasi bekerja untuk melakukan suatu tujuan yang hendak dicapai, dimana objek yang dituju adalah dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan publik.

2. Fungsi Administrasi Publik

Ada tiga fungsi utama administrasi publik yaitu formulasi/perumusan kebijakan, pengaturan/penendalian unsur-unsur administrasi dan penggunaan dinamika administrasi.

- a. Formulasi Kebijakan
Formulasi kebijakan memiliki empat sub fungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program/strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera. Konsistensi tersebut mencakup konsistensi antara waktu/generasi antar unit pemerintah.
- b. Pengaturan/Pengendalian Unsur-Unsur Administrasi
Unsur-unsur administrasi yang perlu dikelola yaitu organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, dan mengendalikan elemen administrasi tersebut.

Pengaturan /pengendalian unsur-unsur administrasi tidak lain adalah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelola kapasitas administrasi publik. Membaiknya kapasitas administrasi publik diukur dari kemampuan menjalankan tugas-tugas rutin dan kemampuan merespon perkembangan eksternal yang mencakup perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan perkembangan-perkembangan internasional.

c. Penggunaan Dinamika Administrasi

Dinamika administrasi meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi. Peraturan/pengendalian unsur-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik, maka penggunaan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik. (Tjiptoherijanto dan Manurung, 2010:112)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi administrasi diatas yang terdiri dari formulasi kebijakan, pengaturan/pengendalian, dan penggunaan dinamika administrasi dapat digunakan pula dalam perumusan strategi pengembangan atau pengelolaan di bidang pariwisata agar tujuan dibentuknya wisata tersebut bisa tercapai dan memuaskan pengunjung di tempat wisata.

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Widjaja (2005:38) pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat yang bahkan dapat dihapus oleh pemerintah pusat, melalui proses hukum. Keberadaan satuan daerah adalah

tergantung (*dependent*) dan di bawah (subordinat) pemerintah pusat. Jadi Pemerintah Daerah itu dapat disimpulkan sebagai pimpinan daerah yang mengatur daerah sesuai dengan kemampuan daerah baik sebagai kepala provinsi yang disebut gubernur, kepala kabupaten/kota yang disebut bupati/walikota melalui pemilihan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (4) penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dilakukan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Desentralisasi di Indonesia menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara.

2. Desentralisasi

Pemerintah perlu memberikan kewenangan bagi tiap-tiap daerah agar lebih mampu mengelola potensi yang ada di daerah masing-masing, karena sejatinya hanya daerah itulah yang lebih mengetahui potensi apa yang ada dan belum ditemukan di daerah tersebut. Pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah disebut desentralisasi. Menurut pendapat Rondinelli (2000:14) desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonom dan perusahaan, pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Penyelenggaraan

pemerintah yang desentralisasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar

Pasal 18, yang berisi:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
- b. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang meliputi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam pasal 18 A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

- a. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dalam pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi dapat diartikan sebagai pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri guna membangun serta mengelola daerah berdasarkan ke khasan daerah tersebut tanpa mencampuri lima urusan wajib pemerintah pusat yang meliputi keuangan atau moneter, agama, hukum atau yustisi, pertahanan dan keamanan, dan politik luar negeri.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah diartikan sebagai pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat (Adisasmita, 2006:235). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan,

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya

dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah.

Tugas pemerintah daerah sebagai aktor yang melayani masyarakat, dengan kehidupan yang aman dan tentram maka masyarakat akan dapat mengemban kemampuan dan kreativitas dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara lebih proaktif. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi yaitu:

1. Fungsi pengaturan.
2. Fungsi pemberdayaan.
3. Fungsi pelayanan (Adisasmita, 2006:236)

Fungsi pengaturan ditunjukkan melalui adanya peraturan daerah. Fungsi pengaturan yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah adalah yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang bersangkutan sepanjang berada dalam ruang lingkup urusan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Fungsi pengaturan yang dapat dijalankan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Fungsi kedua adalah fungsi pemberdayaan. Dengan adanya tuntutan pemerintah daerah agar semakin mandiri, maka pemberdayaan di tingkat organisasi/instansi yang dapat dilakukan adalah menentukan dinas-dinas yang terkait agar mampu menghasilkan dana, dan yang tidak mampu adalah merupakan beban bagi pemerintah daerah. Agar diupayakan penyediaan dana untuk dinas-dinas yang mampu menghasilkan dana harus lebih besar dibandingkan dengan dinas yang tidak mampu menghasilkan dana. Pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan antara lain dengan memberikan rangsangan sehingga masyarakat dapat lebih partisipatif dalam

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, seperti pemberian subsidi kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk melaksanakan program yang telah dirancang sehingga masyarakat lebih berpartisipasi dalam fungsi pemberdayaan.

Fungsi ketiga adalah melakukan pelayanan. Dinas-dinas diharapkan lebih banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat disamping itu harus lebih didorong untuk menghasilkan dana. Pihak legislatif, DPRD dapat meningkatkan peranannya yaitu menampung aspirasi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan fungsi pelayanan.

C. Keuangan Daerah (*Local Government Finance*)

1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan keuangan daerah yakni adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Vazquez dan Smoke (2011:13) pentingnya keuangan daerah (*Local Government Finance*) didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah pemerintah daerah memiliki posisi yang baik untuk meningkatkan bagaimana sumber daya publik digunakan dan sejauh mana kebutuhan warga yang beragam terpuaskan. Yang kedua adalah peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi beberapa tantangan global yang secara luas, meskipun secara diferensial mempengaruhi hampir semua negara.

2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain. Yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

Dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata daerah juga mampu memberikan kontribusi bagi keuangan daerah seperti pajak dari pariwisata atau yang lainnya, namun belum diketahui sejauh mana atau seberapa besar kontribusi pariwisata terhadap keuangan daerah.

3. Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sumber dari keuangan daerah adalah:

a. Dana Perimbangan

Muluk (2005:146) menjelaskan tentang tiga jenis dana perimbangan:

- 1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Dana alokasi umum (*general purpose grand*). Porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
- 3) Dana alokasi khusus (*specific purpose grand*). Dana bantuan ini dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, yakni kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum untuk kebutuhan yang menjadi prioritas nasional.

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan terdiri dari tiga jenis yaitu bagian daerah atas pajak-pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah mencakup berbagai sumber seperti pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Muluk, 2005:146). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain yang dijelaskan oleh Muluk (2005:148) adalah pinjaman daerah (*borrowing*). Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan:

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan lain-lain dapat diartikan sebagai pinjaman yang dilakukan oleh daerah yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang diperoleh dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Namun, pendapatan daerah lain-lain juga dapat diperoleh dari hibah, dana darurat, dan lain-lain. Dana darurat yang dimaksud adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat apabila daerah mengalami bencana.

4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan atas pendapatan asli Daerah; dan

perimbangan; dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. (Hanafi, 2009:38-40)

Kelompok pendapatan asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah. Jenis pajak daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- b. Retribusi Daerah. Jenis retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Jenis hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD;
 - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintahan/BUMN; dan
 - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
 - 4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup
 - a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Daerah;
- e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh Daerah.
- d. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- f. Pendapatan denda pajak.
- g. Pendapatan denda retribusi.
- h. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- i. Pendapatan dari pengembalian.
- j. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- k. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- l. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Berdasarkan poin-poin peningkatan pendapatan asli daerah tersebut, pariwisata tentunya turut berkontribusi dalam pemasukan pendapatan daerah yaitu dalam hal retribusi daerah.

D. Strategi

1. Pengertian Strategi

Beberapa ahli telah banyak mendefinisikan pengertian strategi. Pada umumnya strategi merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh suatu

organisasi untuk mencapai suatu tujuan, dimana berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi tersebut. Strategi menggunakan sebuah perumusan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut.

Menurut Rangkuti (2004:3) ada beberapa perkembangan mengenai konsep strategi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Perkembangan konsep strategi tersebut antara lain:

a. Chandler (1962)

Strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan jangka panjang, program tindak lanjut, dan prioritas alokasi sumber daya.

b. Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977)

Strategi merupakan respon secara terus menerus dan adaptif terhadap suatu peluang dan ancaman dari luar (eksternal) serta kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi suatu organisasi.

c. Hamel dan Prahalad (1995)

Strategi merupakan tindakan yang senantiasa meningkat (inkremental) dan secara terus-menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

d. Robinson dan Pearce (1997)

Strategi merupakan rencana para manajer berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan dimana ia harus bersaing; melawan siapa; dan untuk maksud apa.

e. David (2009)

Strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak serta sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang lima tahun kedepan, dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional serta perlu mempertimbangkan, baik faktor eksternal maupun internal.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu tindakan maupun suatu cara yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut dimana strategi memberikan arahan dan berupaya untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan berdasarkan pertimbangan yang tepat.

2. Tipe-Tipe Strategi

Menurut Ranguti (2004:6) pada prinsipnya strategi dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi, yaitu:

a. Strategi manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.

b. Strategi investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya.

c. Strategi bisnis

Strategi ini juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena berorientasi kepada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

3. Syarat-Syarat Strategi

Orientasi strategi adalah bertumpu pada implikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Agar penyusunan strategi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan secara efektif, menurut Siagian (2002:102) ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Strategi yang dirumuskan harus mampu disuatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya

- negatif atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya;
- b. Strategi harus memperhitungkan secara realistis kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan sumberdaya sarana, prasarana, dan dana yang dipergunakan untuk mengoperasikan strategi tersebut;
 - c. Strategi yang telah ditentukan dioperasikan secara teliti. Tolak ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan dilihat dari proses perumusannya saja, akan tetapi juga mencakup pada operasionalnya atau pelaksanaannya.

Penjelasan mengenai syarat-syarat strategi diatas juga mengindikasikan bahwa dalam pembuatan atau perumusan strategi pengelolaan pariwisata dapat memperoleh manfaat dari berbagai peluang, memperhitungkan secara realistis kemampuan atau potensi tempat wisata tersebut, serta strategi tersebut harus dioperasikan secara teliti.

4. Manajemen Strategi

Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari manajemen strategi. Yang pertama adalah menurut Salusu (2006:492), manajemen strategi merupakan suatu cara memimpin organisasi untuk mencapai misi, tujuan, dan sasarannya. Hal itu dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan manajerial, tanggung jawab organisasional, sistem administrasi yang baik, yang dapat menghubungkan pengambilan keputusan strategi dengan pengambilan keputusan operasional, pada semua tingkatan hierarki organisasi, dan pada semua jajaran kewenangan fungsional dalam organisasi. Pendek kata, menurut Salusu (2006:493) manajemen strategi adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai.

David (2009:5) menambahkan bahwa manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategi berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Tujuan dari manajemen strategi adalah untuk mengeksplorasi serta menciptakan berbagai peluang baru yang berbeda. Menurut Siagian (2002:15) manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah suatu usaha yang mencakup serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.

Menurut David (2009:9) proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- a. Perumusan strategi yang mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.
- b. Penerapan strategi yang sering kali disebut “tahap aksi” dari manajemen strategi dimana penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, pengurangan ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan informasi.

- c. Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar adalah: (1) peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, (2) pengukuran kinerja, dan (3) pengambilan langkah korektif.

Tiga tahap perumusan strategi tersebut apabila diaplikasikan dalam penyusunan strategi pengelolaan pariwisata khususnya desa wisata dapat dilakukan. Seperti pengembangan visi misi desa wisata dan identifikasi faktor internal eksternal, kemudian masuk ke tahap aksi seperti penyiapan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan fasilitas desa wisata serta pengembangan, dan penilaian strategi yang merupakan tahap akhir agar kekurangan yang ada di desa wisata tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan di tahun berikutnya.

5. Strategi Pengelolaan Pariwisata

Dalam pengembangan atau pengelolaan suatu pariwisata, tentunya diperlukan strategi agar pengelolaan pariwisata tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan definisi strategi yaitu suatu tindakan maupun suatu cara yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Begitu pula dengan pariwisata diperlukan strategi agar tujuan dibentuknya suatu wisata tersebut dapat tercapai.

Ada enam strategi pengelolaan pariwisata menurut Biduan (2015:9) yaitu:

- a. Penyediaan rencana induk pengembangan pariwisata.
- b. Penyiapan program/kegiatan sesuai ketersediaan anggaran.
- c. Pengoptimalisasian promosi pariwisata.

- d. Dukungan regulasi.
- e. Kemitraan dengan swasta.
- f. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Keenam strategi pengelolaan pariwisata tersebut tentunya patut diterapkan juga untuk pengelolaan suatu desa wisata agar semakin berkembang serta mampu bersaing dengan jenis pariwisata lainnya.

E. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Menurut Suwena (2014:31), pariwisata merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, dan lain sebagainya yang merupakan objek kajian sosiologi. Pariwisata sendiri juga sangat berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Tokoh Hartono berpendapat, peranan pariwisata dalam pembangunan Negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yakni segi ekonomis (sumber devisa, pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kepada wisatawan asing). Segi tersebut tidak hanya berlaku bagi wisatawan-wisatawan asing, tetapi juga untuk wisatawan-wisatawan domestik yang kian meningkat perannya (Spillane, 1974).

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pendit (1990) dalam Soebagyo (2012:154), pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyediakan lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan

dalam usaha-usaha pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya, pengangkutan serta mendorong pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek sarana budaya, pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya yang dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar.

2. Jenis Pariwisata

Pariwisata dibedakan menurut bentuk jenisnya sesuai dengan maksud dan tujuan wisatawan untuk berkunjung. Pendit (2002:36), mengklasifikasikan jenis pariwisata yang dikelompokkan yaitu:

- a. **Wisata Cagar Alam**
Jenis wisata ini terkait dengan kegemaran akan keindahan alam, hawa udara yang segar di pegunungan, kehidupan binatang dan marga satwa langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang ditemui.
- b. **Wisata Budaya**
Tujuannya adalah ingin memperluas pandangan hidup dan kunjungan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan masyarakat setempat, kebiasaan adat istiadat, cara hidup, budaya dan kesenian daerah.
- c. **Wisata Pertanian**
Mengandalkan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan, sambil menikmati segarnya aneka ragam tanaman.
- d. **Wisata Bahari**
Wisata yang dihubungkan dengan olahraga air atau laut seperti memancing, menyelam, berlayar, selancar, melihat tanaman laut serta berbagai rekreasi perairan lainnya.
- e. **Wisata Kesehatan**
Keperluan istirahat dalam arti jasmani dan rohani yang mengunjungi tempat peristirahatan, seperti air panas yang mengandung mineral, iklim yang sejuk dan menyehatkan.
- f. **Wisata Komersial**
Mengadakan perjalanan mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang dengan dimeriahkan berbagai atraksi seni.
- g. *Pilgrim*

Dikaitkan dengan agama, sejarah, adat dan kepercayaan umat atau kelompok masyarakat dengan cara mengunjungi tempat suci, makam orang besar, pemimpin yang diagungkan, tempat penuh legenda, bukit atau gunung yang dianggap keramat.

Sedangkan menurut Suwanto (2001:17) jenis-jenis wisata dibagi menjadi lima kategori berdasarkan penyelenggaraannya, yaitu:

- a. *Excursion*, yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi satu atau lebih objek wisata.
- b. *Safari tour*, yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus dengan perlengkapan maupun peralatan khusus pula yang tujuan maupun objeknya bukan merupakan objek kunjungan wisata pada umumnya.
- c. *Cruise tour* yaitu perjalanan wisata dengan menggunakan kapal pesiar untuk mengunjungi objek-objek wisata bahari dan objek wisata di darat tetapi menggunakan kapal pesiar sebagai basis pemberangkatannya.
- d. *Youth tour*, yaitu kunjungan wisata yang penyelenggaraannya khusus diperuntukkan bagi para remaja menurut golongan umur yang ditetapkan oleh hukum negara masing-masing.
- e. *Marine tour*, yaitu suatu kunjungan ke objek wisata, khususnya untuk menyaksikan keindahan laut dan menyelam dengan perlengkapan selam lengkap.

Berdasarkan jenis yang telah disebutkan diatas, maka dapat dipahami bahwa jenis-jenis wisata sangatlah banyak, tergantung pada orang yang mengklasifikasikannya. Pengelompokan jenis-jenis pariwisata tergantung pada seseorang yang menafsirkan wisata untuk dinikmati dan dari sudut

pandang yang berbeda satu sama lain. Jadi tidak ada satu klasifikasi paten dari jenis wisata, karena tergantung pada aspirasi dan kembangan dari ide-ide wisatawan.

3. Dampak Pariwisata

Pariwisata memiliki daya tarik yang dapat mendatangkan beberapa dampak bagi masyarakat sekitar, daerah, dan negara. Ada beberapa dampak dalam pengelolaan pariwisata yaitu:

a. Dampak sosial ekonomi

Menurut Cohen dalam Suwena (2005:110) dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar yaitu:

- 1) Dampak terhadap penerimaan devisa,
- 2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat,
- 3) Dampak terhadap kesempatan kerja,
- 4) Dampak terhadap harga-harga,
- 5) Dampak terhadap kontribusi manfaat/keuntungan,
- 6) Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol,
- 7) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya,
- 8) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

b. Dampak sosial budaya

Dampak pariwisata dalam bidang sosial budaya menurut Figuerola (Suwena, 2005:117) adalah:

- 1) Dampak terhadap struktur geografis,

- 2) Dampak terhadap bentuk dan tipe mata pencaharian,
- 3) Dampak terhadap transformasi nilai,
- 4) Dampak terhadap gaya tradisional,
- 5) Dampak terhadap pola konsumsi, dan
- 6) Dampak terhadap pembangunan masyarakat yang merupakan manfaat sosial-budaya pariwisata.

Dari beberapa dampak diatas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata memiliki potensi yang menguntungkan apabila dapat dikelola secara efektif. Dimana, dari dampak-dampak yang telah dikemukakan sebelumnya akan memberikan kontribusi bagi negara, daerah, swasta, bahkan masyarakat sekitar daerah wisata.

4. *Community Based Tourism*

Menurut Garrod (2001: 4), terdapat dua pendekatan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip perencanaan dalam konteks pariwisata. Pendekatan pertama yaitu cenderung dikaitkan dengan faktor perencanaan formal sangat menekankan pada keuntungan potensial dari ekowisata, sedangkan pendekatan yang kedua cenderung dikaitkan dengan istilah perencanaan yang partisipatif yang lebih concern dengan ketentuan dan pengaturan yang lebih seimbang antara pembangunan dan perencanaan terkendali. Menurut penjelasan diatas, kedua pendekatan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa wisata tersebut. Salah satu bentuk perencanaan partisipatif dalam pengembangan pariwisata adalah dengan menerapkan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pendekatan

pembangunan. Definisi *Community Based Tourism* (CBT) menurut I Wayan Pantiyasa (2011: 15), yaitu :

- 1) Bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata
- 2) Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan
- 3) Menurut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan.

Dengan demikian *Community Based Tourism* (CBT) merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal dalam bentuk memberikan kesempatan dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang berujung pada pemberdayaan masyarakat melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat. Suansri (2003: 14), mendefinisikan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, dan budaya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *Community Based Tourism*, merupakan alat dari pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan, atau dengan kata lain *Community Based Tourism* merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Ciri-ciri khusus dari *Community Based Tourism* menurut Hudson dalam Timothy (1999: 373) adalah berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal yang memiliki ketertarikan/minat, yang memiliki kontrol besar dalam

proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan. Menurut Wearing dalam Made Heny (2013: 132), masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata, dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan dan implementasi. Ilustrasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan dari judul, rumusan masalah, dan tujuan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Mardalis, 2008: 26). Sedangkan menurut Moleong (2007: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Dengan digunakannya metode penelitian kualitatif diharapkan data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam, dan lebih bermakna sehingga hasil penelitian dapat tercapai. Menurut pendapat Alwasilah (2006:154) "... metode kualitatif lebih mudah untuk diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling berinteraksi. Penelitian kualitatif juga dinilai lebih sensitif terhadap segala aspek dan perubahan yang saling mempengaruhi yang bakal dihadapi oleh peneliti."

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2014: 207). Fokus penelitian nantinya akan menjadi acuan bagi peneliti sebagai batasan yang diarahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai tempat melakukan penelitian. Beberapa alternatif untuk menetapkan fokus penelitian yang dijelaskan oleh Spradley dalam Faisal (1988) diantaranya; menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek, dan menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Adapun fokus penelitian dirangkum dalam beberapa domain yaitu:

1. Strategi Pengelolaan Desa Wisata menurut Biduan (2015:9) oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
 - a. Penyediaan rencana induk pengembangan pariwisata.
 - b. Penyiapan program kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
 - c. Pengoptimalisasian promosi pariwisata.
 - d. Dukungan regulasi.
 - e. Kemitraan dengan swasta.
 - f. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata.
2. Kontribusi Desa Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu melalui Pajak Hiburan tahun 2017.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pengelolaan Desa Wisata.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pada lokasi penelitian ini peneliti dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan data dan informasi terkait dengan masalah yang telah menjadi objek. Adapun lokasi penelitian ini adalah Kota Batu. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi wisata yang tinggi, baik wisata artifisial maupun potensi wisata alam yang sekarang menjadi daya tarik dimana nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah khususnya masyarakat yang tinggal di lingkungan objek pariwisata.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari objek penelitian sehingga peneliti mendapatkan data yang akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Dengan demikian situs yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Pariwisata Kota Batu yang berada di Balai Kota Among Tani, Gedung A lantai 2 Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Instansi pemerintah tersebut terkait dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Kota Batu.

D. Jenis dan Sumber Data

Setiap peneliti agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan sesuai apa yang dikehendaki dalam penelitiannya, tentunya perlu ditunjang dengan data-data yang relevan, baik dalam jumlah maupun jenis data yang diperlukan. Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Moleong menjelaskan sumber data utama

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2011:157). Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara (interview) dan pengamatan langsung (observasi) di lapangan dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Adapun data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu::

1. Data Primer

Menurut Umar (2003: 56) data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Data primer didapatkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber yang bekerja di Dinas Pariwisata Kota Batu, dan wisatawan serta warga sekitar desa wisata.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup informasi yang dikumpulkan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder ialah data yang berupa data tertulis yang memiliki sumber dari dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan objek yang akan diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen dokumen mengenai pariwisata, laporan-laporan keuangan PAD, undang-undang dan peraturan perundang-undangan atau informasi tertulis hasil studi pustaka yang bersumber pada literatur seperti buku pemerintah desa pariwisata, jurnal mengenai strategi pengelolaan atau pembangunan desa wisata, surat kabar, internet untuk

mendapat pemahaman yang lebih mengenai pengelolaan desa wisata, serta media lainnya agar mampu menunjang apa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seperti menurut Arikunto (2006:129) bahwa didalam mempermudah dan mengklasifikasikan sebuah data, sumber data dapat diidentifikasi menjadi tiga yaitu :

1. *Person*, yaitu sumber data bis memberikan data yang berupa jawaban lisan, atau jawaban tertulis melalui angket/kuisisioner.
2. *Paper*, yaitu sumber data yang menjadikan data-data berupa huruf, angka, simbol dan lainnya.
3. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti mendapatkan informasi secara obyektif. Oleh karena itu peneliti menggunakan tiga cara dalam teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Wawancara Mendalam atau *In Depth Interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2007:186). Wawancara akan dilakukan peneliti secara *face to face* antara peneliti dengan narasumber dengan model pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, lalu hasil wawancara akan direkam atau ditulis di kertas yang telah disediakan. Dengan teknik wawancara diharapkan informasi yang didapatkan lebih banyak dan lebih akurat. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan

menggunakan narasumber dari pegawai Dinas Pariwisata Kota Batu yang bersangkutan. Berdasarkan dari pelaksanaannya, wawancara dibedakan menjadi tiga:

- a. Interview bebas (*inguided interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja;
- b. Interview terpimpin (*guide interview*), yaitu interview yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci;
- c. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dengan interview terpimpin, pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, dimana akan ada beberapa pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya oleh penulis namun ada beberapa pertanyaan spontan yang dilakukan untuk memperjelas data yang diinginkan sehingga hasil lebih terperinci.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap strategi pengelolaan desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu melalui instansi yang terkait yaitu Dinas Pariwisata Kota Batu. Pengamatan yang dilakukan dikhususkan pada pernyataan dari narasumber Dinas Pariwisata Kota Batu mengenai strategi yang paling optimal dilakukan adalah pengoptimalisasian promosi pariwisata yang akan diamati oleh peneliti selama melakukan perjalanan dari perbatasan antara Kota Malang dengan Kota Batu sampai ke kantor Dinas Pariwisata Kota Batu. Pengamatan ini dilakukan untuk menemukan bukti mengenai promosi. Selain itu peneliti mencoba mencari

kebenaran tentang promosi yang dilakukan di beberapa media sosial seperti website, facebook, instagram, twitter, dan beberapa berita elektronik lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan data-data yang sudah ada, literatur terkait dengan penelitian baik dari buku, catatan harian, jurnal, dokumen, dokumentasi foto, video, dan literatur lainnya yang dianggap penting. Dokumentasi dilakukan oleh penulis untuk memastikan apakah penelitian telah dilakukan. Adapun dokumentasi dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Batu, yang melibatkan beberapa staf sebagai pemberi data dan responden wawancara yang dilakukan oleh penulis yang kemudian hasil dokumentasi di letakkan pada bagian bab 4 untuk memperkuat data wawancara. Selain dilakukan di Dinas Pariwisata, dokumentasi juga dilakukan di beberapa desa wisata untuk melihat kondisi nyata dari pernyataan pihak Dinas Pariwisata.

Dokumentasi dilakukan penulis dengan menggunakan kamera ponsel yang peneliti punya. Sedangkan, dokumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya meliputi, Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu, data pendapatan desa wisata, dan data pendapatan asli daerah.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam Sugiyono (2014:102) adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Yang menjadi dasar pada instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dimana peneliti mencari data ataupun informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan diharapkan peneliti akan menangkap fenomena-fenomena yang sedang terjadi terkait dengan penelitiannya.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar dalam mendapatkan informasi sesuai dengan topik yang diangkat serta sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Pedoman wawancara juga berfungsi agar mendapatkan informasi sesuai dengan fokus yang diambil dalam penelitian. Pedoman wawancara telah disediakan terlebih dahulu, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian yang dilakukan kepada responden.

3. Alat tulis dan perekam

Alat tulis membantu peneliti dalam mencatat kejadian yang terjadi di lapangan, sedangkan alat perekam seperti kamera ataupun *handphone* berfungsi mengambil gambar yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan topik penelitian. Sehingga alat bantu diperlukan untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya.

G. Analisis Data

Analisis data hasil merupakan tahapan dan bagian yang sangat penting didalam suatu penelitian ilmiah, sebab dengan menggunakan analisis data akan memberikan pemaknaan bagi data dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir peneliti. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2011:246) mengemukakan bahwa analisis data merupakan suatu kegiatan pengolahan data agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus- menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut adalah penjelasan analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti dalam hal ini mengumpulkan tiga teknik pengumpulan data yakni Observasi (pengamatan) yang dilakukan berupa pengamatan terhadap strategi pengelolaan desa wisata dengan cara mencatat hasil dari strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu dalam pengembangan atau pengelolaan desa wisata serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, *Interview* (wawancara) yang dilakukan berupa pertanyaan yang disediakan sebelumnya oleh peneliti dan juga beberapa pertanyaan yang spontan yang dilakukan untuk memperjelas data yang diinginkan sehingga hasil yang didapat lebih terperinci dan Dokumentasi yang dilakukan berupa cara mengumpulkan dan memanfaatkan data-data

yang sudah ada, literatur terkait dengan penelitian baik dari buku, catatan harian, jurnal, dokumen, dokumentasi foto, video dan literatur lainnya yang dianggap penting. Hal ini dikarenakan data yang diinginkan oleh peneliti di lapangan berbeda dan tidak berbentuk dokumen saja akan tetapi bisa berbentuk pernyataan maupun gambar. Oleh karena itu peneliti melakukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan sebuah informasi yang mendalam dari beberapa informan terhadap pengamatan yang dilakukan peneliti, maupun dokumen yang didapatkan oleh peneliti. Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukannya berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan data dan kejenuhan data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian ini.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, data tersebut kemudian ditelaah. Data kasar yang telah ditemukan dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar disesuaikan dengan fokus dalam penelitian ini, yaitu yang pertama isu-isu strategis. Fokus kedua adalah terkait dengan pelaksanaan dan capaian strategi, respon dari kelompok sasaran serta faktor pendukung dan penghambat. Dalam tahapan ini, peneliti mengabaikan data yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian. Sehingga data dalam tahapan ini hanya yang berhubungan dengan judul penelitian.

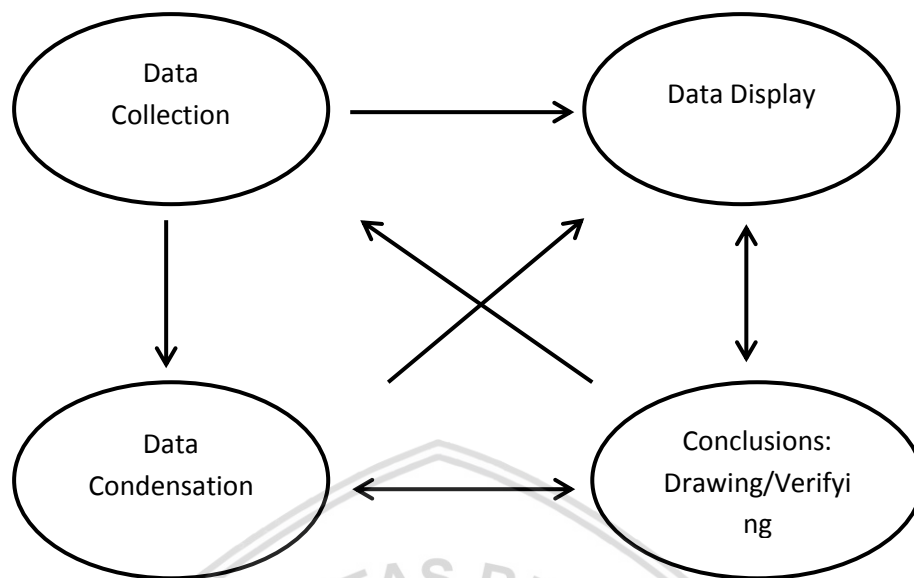
3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berisi kumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data juga diikuti dengan analisis data. Di dalam analisis data yang disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga data yang disajikan dapat memberikan pengetahuan dan kekayaan informasi.

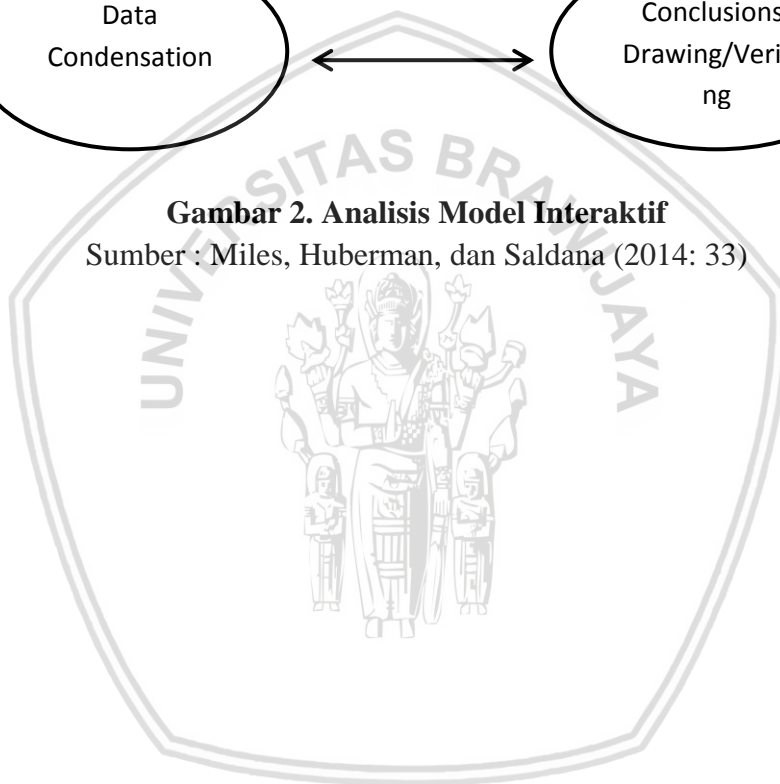
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivying*)

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dari tahapan pengujian data, peneliti mencari makna dari data yang telah dianalisis dan disajikan. Setelah peneliti mengetahui makna dari setiap permasalahan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan merupakan hasil dari keseluruhan yang telah dianalisis datanya agar dapat dikaitkan dengan teori dan regulasi yang ada.

Berdasarkan analisa yang sudah diuraikan diatas maka penyajian data dan penulisan skripsi peneliti nantinya akan merujuk pada poin-poin diatas, sehingga diharapkan dalam proses penulisan skripsi nantinya bisa lebih terstruktur dan terarah. Analisa diatas dapat digambarkan kedalam bagan yang akan terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. Analisis Model Interaktif
Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 33)



Sebagai salah satu daerah otonom baru maka Kota Batu akan menghadapi banyak tugas dan tantangan dalam mengembangkan pembangunannya di masa mendatang terutama di era Otonomi Daerah. Saat ini Kota Batu telah memasuki tahun empat belas. Pada tahun 2015, Kota Batu masih terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu: Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji.

a. Kondisi Geografis Kota Batu

Kota Batu dapat dibagi menjadi 4 jenis tanah. Pertama jenis tanah andosol, berupa lahan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Kedua jenis tanah kambisol, berupa jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo seluas 741,25 ha dan Kecamatan bumiaji seluas 1395,81 ha. Ketiga, yaitu jenis tanah alluvial yang berupa tanah kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo seluas 199,93 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 376,48 ha. Dan yang keempat adalah jenis tanah Latosol meliputi Kecamatan Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan Junrejo seluas 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 408,61 ha.

Ditinjau dari astronomi, Kota Batu terletak diantara $122^{\circ} 17'$ sampai dengan $122^{\circ} 57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44'$ sampai dengan $8^{\circ} 26'$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
Sebelah Timur	: Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Malang (Batu dalam Angka 2014).

b. Kondisi Pemerintahan Kota Batu

Secara administrasi, Kota Batu terbagi menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji. Sedangkan rincian luas wilayah masing-masing kecamatan di Kota Batu dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. Luas Wilayah Kota Batu menurut Kecamatan (Ha) Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase (%)
1.	Batu	45,46	12,88
2.	Bumiaji	127,98	22,83
3.	Junrejo	25,65	64,28
	JUMLAH	199,09	100

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2017

Selain itu Kota Batu terbagi menjadi 24 desa/kelurahan, 238 RW dan 1.127 RT. Jumlah desa/kelurahan terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Bumiaji yaitu masing-masing 9 desa/kelurahan, sedangkan jumlah RW dan RT terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Batu. Banyaknya jumlah desa/kelurahan yang dimiliki tidak otomatis menjadi daerah dengan jumlah RW dan RT terbanyak pula. Terbukti jumlah RW dan RT terbanyak di Kecamatan Batu yaitu masing-masing 96 RW dan 457 RT. Berikutnya Kecamatan Bumiaji 59 RW dan 430 RT, sisanya berada di Kecamatan Junrejo.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini tidak akan berhasil apabila desa/kelurahan sebagai satuan terkecil pemerintahan tidak pernah tersentuh pembangunan. Pada tahun 2014, hasil pembangunan di Kota Batu telah dapat dirasakan. Hal ini ditengarai dari jumlah status desa di Kota Batu yang telah mencapai tingkat swasembada yaitu sebanyak 24 desa/kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa semua desa/kelurahan di Kota Batu memiliki partisipasi yang baik dan kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah, dan tugas-tugas pembangunan di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat (Kota Batu dalam Angka 2015 h.19)

c. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kota Batu tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji. Hampir separuh penduduk Kota Batu bertempat tinggal di Kecamatan Batu (46,48%), sementara separuhnya lagi bertempat tinggal di Bumiaji (28,76%) dan Junrejo (24,76%). Dari sisi luas wilayah sebenarnya Kecamatan Bumiaji adalah Kecamatan yang memiliki luas terbesar dibandingkan dua kecamatan lainnya. Hal ini dipahami karena secara geografis Kecamatan Batu memiliki wilayah yang relatif datar dari dua kecamatan lain. Sementara Kecamatan Bumiaji meskipun memiliki luas wilayah paling besar tetapi kondisi geografis

wilayah kecamatan ini merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar digunakan untuk wilayah pertanian dan konservasi lingkungan.

Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator yang umum dipakai adalah Rasio Kepadatan Penduduk (*density ratio*) yaitu rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun tertentu. Sehingga jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya maka Kecamatan Batu menjadi kecamatan terpadat di Kota Batu, diikuti Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Sebenarnya kepadatan penduduk Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo hampir sama. Hal ini ter jelaskan dari jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Junrejo hanya separuh dari jumlah penduduk di Kecamatan Batu tetapi luas wilayahnya juga separuh dari luas wilayah Kecamatan Batu.

Indikator komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di suatu wilayah atau umum dikenal dengan *Sex-Ratio* atau Rasio Jenis Kelamin. Indikator ini juga sering digunakan untuk menyatakan banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Indikator ini dihitung sebagai persentase rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Di Kota Batu pada tiga kecamatan diatas semuanya mencapai angka 100%. Artinya penduduk laki-laki di Kota Batu masih lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Kota batu terbuka bagi siapa saja baik WNI maupun WNA. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu di tahun 2014, WNA di

Kota Batu sekitar 0,012 persen dari total penduduk yang tercatat di Dispendukcapil Kota Batu. Penduduk WNA di Kota Batu terdiri dari 25 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Keberadaan WNA ini tersebar di tiga kecamatan. Kecamatan Batu rupanya dipilih sebagian besar WNA untuk memilih tempat tinggal yaitu 18 orang yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sisanya memilih tinggal di Kecamatan Junrejo 1 orang laki-laki dan di Kecamatan Bumiaji 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan (Batu dalam Angka, 2015:43)

d. Kondisi Pariwisata di Kota Batu

Industri pariwisata merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Kota Batu. Adanya sektor pariwisata ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu melalui tempat-tempat wisata yang ada di Batu dan sarana-sarana akomodasi seperti hotel, motel dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat melalui data jumlah hotel, jumlah tamu yang menginap, rata-rata lama menginap, tingkat penghunian kamar, dan jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata. Tingkat penghunian kamar hotel di Kota Batu secara total mencapai 27,49% pada tahun 2014, lebih rendah dibanding tahun 2013 yang mencapai 37,99%. Dengan tingkat penghunian kamar hotel sebesar 27,49% rata-rata selama setahun, berarti misalnya sebuah hotel memiliki kapasitas 100 kamar hanya 27. Sejalan dengan jumlah tamu yang menginap di hotel dan penginapan, gambaran kegiatan pariwisata di Kota Batu dapat didekati dari jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata. Pada tahun 2014, jumlah wisatawan baik

mancanegara maupun wisatawan domestik yang mengunjungi objek wisata di Kota Batu tercatat sebanyak 2.025.541 pengunjung. Beberapa objek wisata di Kota Batu mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Wisatawan yang mengunjungi BNS, Kusuma Agro dan Cangar masing-masing meningkat sebesar 27,42 persen, 5,2 persen, dan 15,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Kota Batu dalam angka 2015 h.213).

2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Batu

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Dinas Pariwisata Kota Batu adalah Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu. Dinas Pariwisata Kota Batu mempunyai tugas-tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- 2) Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 3) Perencanaan dan pengendalian anggaran;
- 4) Pengendalian urusan administrasi Dinas;

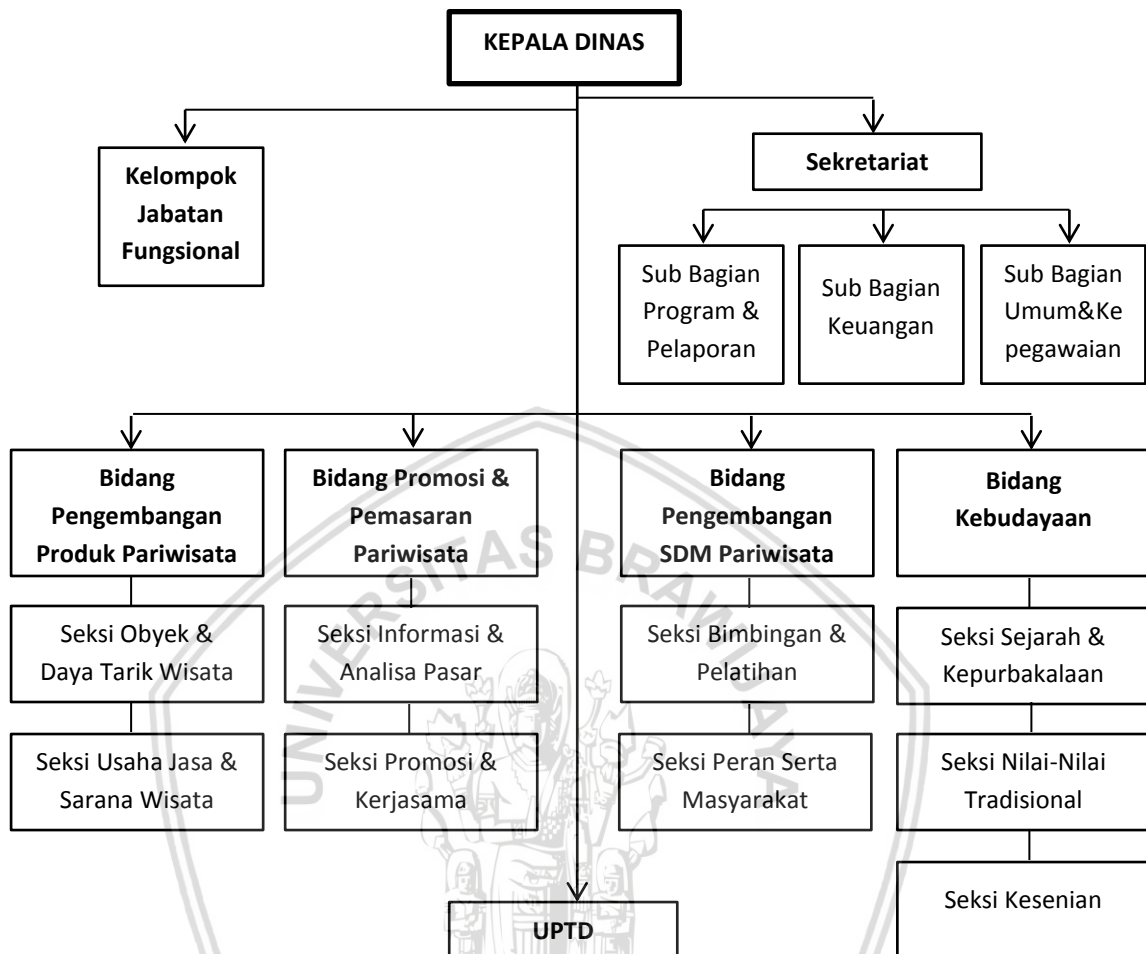
- 5) Pembinaan pengembangan produk pariwisata;
- 6) Pembinaan promosi dan pemasaran pariwisata;
- 7) Pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 8) Pembinaan pengembangan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah, dan purbakala;
- 9) Penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama bidang pariwisata di antara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- 11) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pariwisata yang diterapkan dalam peraturan Daerah tersebut tersusun atas:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi:
 - a) Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata
 - b) Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
- 4) Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, membawahi:

- a) Seksi Informasi dan Analisa Pasar
 - b) Seksi Promosi dan Kerja Sama
- 5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, membawahi:
- a) Seksi Bimbingan dan Pelatihan
 - b) Seksi Peran Serta Masyarakat
- 6) Bidang Kebudayaan, membawahi:
- a) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
 - b) Seksi Nilai-Nilai Tradisional
 - c) Seksi Kesenian dan Perfilman





Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Batu 2017

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pariwisata. Adapun fungsi dari Kepala Dinas adalah:

- 1) Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pariwisata;

- 2) Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM);
- 3) Perencanaan dan pengendalian anggaran;
- 4) Pengendalian urusan administrasi Dinas;
- 5) Pembinaan pengembangan produk pariwisata;
- 6) Pembinaan promosi dan pemasaran pariwisata;
- 7) Pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 8) Pembinaan pengembangan kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah, dan purbakala;
- 9) Penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan, serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama bidang pariwisata dan kebudayaan di antara OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- 11) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan rencana kerja Dinas, mengendalikan administrasi keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas. Adapun fungsi dari Sekretariat adalah:

- 1) Merencanakan kerangka kerja Dinas
- 2) Mengendalikan administrasi keuangan
- 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
- 4) Melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan pengembangan produk pariwisata. Bidang pengembangan produk pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan rencana kerja Bidang;
- 2) Penyusunan pedoman teknis program kegiatan pengembangan produk pariwisata;
- 3) Pembinaan potensi usaha kepariwisataan;
- 4) Pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum
- 5) Pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek daya tarik wisata;
- 6) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;
- 7) Pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata;

- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang, dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Dalam melaksanakannya, bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan rencana kerja Bidang;
- 2) Penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 3) Pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 4) Penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata;
- 5) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
- 6) Penyusunan teknis kerja sama dengan instansi terkait di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkaji, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata.

Berdasarkan tugas tersebut, maka fungsi dari Bidang promosi dan pemasaran pariwisata adalah:

- 1) Perumusan rencana kerja Bidang;
- 2) Penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan promosi, pemasaran, dan kerjasama kebudayaan dan pariwisata;
- 3) Perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) skala daerah;
- 4) Pengkajian kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata;
- 5) Pembinaan pameran/*event* kebudayaan dan pariwisata;
- 6) Pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata
- 7) Perumusan *branding* (merek) dan *tagline* (slogan) pariwisata;
- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Batu

Visi dari Dinas Pariwisata Kota Batu adalah “Terwujudnya Kota Batu Sebagai Kota Kepariwisataan Internasional”. Untuk mewujudkan visi yang tersebut diatas, maka perlu dijabarkan misi Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan
- 2) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di tingkat global

- 3) Mengembangkan Desa/kelurahan menjadi Desa Wisata yang berbasis potensi dan masyarakat
- 4) Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder pariwisata baik tingkat regional, nasional, dan internasional
- 5) Melakukan promosi pariwisata secara kontinyu baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional

c. Tujuan

Untuk mewujudkan misi meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, dengan kepuasan wisatawan akan produk pariwisata sebagai sasaran jangka menengahnya.

Untuk mewujudkan misi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di tingkat global perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu meningkatkan kompetensi pelaku wisata, dengan kepuasan wisatawan terhadap pelayanan pelaku wisata sebagai sasaran jangka menengahnya.

Untuk mewujudkan misi membangun hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder pariwisata baik di tingkat regional, nasional dan internasional perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu membangun hubungan kerjasama dengan stakeholder pariwisata, dengan meningkatkan peran serta stakeholder pariwisata dalam menjual dan memanfaatkan potensi wisata sebagai sasaran jangka menengahnya.

Untuk mewujudkan misi melakukan promosi pariwisata secara kontinyu baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional perlu dirumuskan sebuah tujuan yaitu, melakukan promosi pariwisata, dengan meningkatkan kunjungan wisatawan sebagai sasaran jangka menengahnya.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Strategi Pengelolaan Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Batu

Dinas Pariwisata Kota Batu adalah instansi pemerintah Kota Batu yang menangani tentang pengelolaan pariwisata yang ada di Kota Batu yang mana tugas tersebut sesuai dengan tugas bagian pariwisata dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu. Desa Wisata merupakan salah satu pilihan objek wisata yang berada di Kota Batu, dengan mengunggulkan potensi alam dan kearifan lokal. Beberapa diantaranya yaitu Desa Oro-oro Ombo, dan Kampung Wisata Kungkuk di Desa Punten.



Gambar 5. Kampung Wisata Kungkuk di Desa Punten Kota Batu
Sumber: www.lingkarmalang.com/kampung-wisata-kungkuk.html 2017



Gambar 6. Objek Wisata Coban Rais di Desa Wisata Oro-Oro Ombo Kota Batu

Sumber: <https://explorewisata.com/2017>

a. Penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Penyediaan rencana induk tentang pengembangan pariwisata sangat penting dalam pengelolaan pariwisata, termasuk desa wisata di Kota Batu. Namun pada saat ini rencana induk tentang pengembangan pariwisata di Kota Batu sendiri masih dalam tahap pembahasan. Dalam tahap pembahasan dan persiapan rencana induk pengembangan pariwisata, saat ini dilakukan pemetaan desa wisata di Kota Batu untuk mengetahui potensi yang ada di tiap-tiap desa. Karena selama ini desa wisata yang ada di Kota Batu didirikan oleh masyarakat di desa tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Dhien Hisyam selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, yaitu:

“saat ini memang RIPPDA masih dalam proses pembahasan, termasuk tentang desa wisata semua akan diakomodir oleh RIPPDA lalu akan di Perda-kan. Sebelumnya RIPPDA di Kota Batu sudah ada tapi karena

ada RPJMD yang baru, sehingga rencana induk pariwisata ini disesuaikan dengan visi dan misi walikota” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Konsep pengembangan merupakan konsep yang ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Batu. Tujuan dari perencanaan pengembangan pariwisata adalah untuk dapat merangsang dan meningkatkan kemampuan potensi sumber daya wisata, termasuk potensi di tiap-tiap desa wisata di Kota Batu. Meskipun saat ini rencana induk pengembangan pariwisata masih dalam tahap pembahasan, tapi dinas pariwisata mempersiapkan agar semuanya termasuk desa wisata bisa terakomodir di dalam RIPPDA pada nantinya. Pernyataan tersebut berdasarkan penjelasan dari Ibu Dhien Hisyam, yaitu:

“sebagai persiapan penyusunan RIPPDA, sekarang Dinas Pariwisata melakukan pemetaan potensi masing-masing desa di kota batu sebanyak 5 kelurahan dan 19 desa. Hal ini perlu dipetakan karena pengelompokan dari desa wisata yaitu: berpotensi, berkembang, dan maju. Artinya, kalau berpotensi Dinas Pariwisata masih melakukan identifikasi, berkembang berarti desa tersebut sudah melakukan implementasi, sedangkan maju berarti implementasi sudah dikembangkan dengan inovasi baik produk, sumber daya manusianya, manajemennya, serta termasuk promosi mengenai paket wisata di desa wisata lewat medsos dan lainnya. Jadi strategi dari dinas pariwisata sendiri untuk pengelolaan desa wisata yaitu dengan mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa permasalahannya. Selanjutnya akan dilakukan revitalisasi tim percepatan pengembangan desa wisata di tahun 2018, dilakukan pembinaan di seluruh desa/kelurahan dengan mengundang kepala desa, pengelola desa wisata, POKDARWIS, juga BUMDES. Setelah sosialisasi akan dilakukan studi banding dengan daerah yang telah berhasil pengelolaan desa wisata seperti di Yogyakarta yaitu daerah Gunung Kidul. Saat melakukan sosialisasi dengan kelurahan, kami akan mengundang salah satu tokoh pemuda yang memelopori program etiketing dari Desa Wisata Nglanggeran di Yogyakarta yaitu bapak Sugeng, serta bapak Sony selaku manajer dari BFG (Batu Flower Garden) di Desa Wisata Oro-Oro Ombo yang telah melanglang buana

ke berbagai daerah dalam rangka peningkatan pengembangan pariwisata, sehingga beliau nanti bisa memberikan motivasi bagi desa-desa wisata di batu” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Dari wawancara tersebut, dalam pengelolaan desa wisata di Kota Batu ada beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sebagai bentuk persiapan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang nantinya juga akan mengakomodir tentang pengembangan desa wisata Kota Batu antara lain; pemetaan potensi desa wisata, revitalisasi tim percepatan pengembangan desa wisata, sosialisasi dan pembinaan di seluruh desa/kelurahan Kota Batu, dan studi banding dengan daerah yang telah berhasil dengan pengelolaan desa wisatanya seperti di Yogyakarta.

b. Penyiapan Program atau Kegiatan Sesuai dengan Kebutuhan

Program atau rencana kegiatan diperlukan untuk mengukur seberapa jauh keinginan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata. Program atau rencana kegiatan ini membutuhkan ketersediaan anggaran yang tentunya tidak sedikit untuk merealisasikannya. Namun bukan berarti program atau kegiatan harus berpedoman dengan anggaran, karena pada kenyataannya program kegiatan dibuat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas kebutuhan di suatu daerah atau obyek misalnya desa wisata. Dengan adanya program atau rencana kegiatan diharapkan mampu memaksimalkan dalam pengembangan dan pengelolaan objek pariwisata di Kota Batu khususnya desa wisata. Dinas Pariwisata Kota Batu telah menyiapkan beberapa program atau rencana kegiatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan

di desa wisata yang ada di Kota Batu. Hal ini berdasarkan wawancara bersama Ibu Dhien Hisyam selaku kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, yaitu:

“antara kegiatan dengan ketersediaan anggarannya memang harus sesuai, termasuk di Kota Batu dan di Dinas Pariwisata. Tapi tidak harus dengan adanya anggaran kita membuat sebuah program tetapi program dibuat berdasarkan kebutuhan disana dan harus saling bersinergi, baik dengan OPD lain dan dengan desa itu sendiri bila tentang pengembangan desa wisata. Dan kebetulan dari desa ada dana ADD, Kota Batu juga fokus ke arah sana karena dengan pengembangan desa wisata akan berdampak langsung kepada masyarakat. Kegiatan pengelolaan obyek desa wisata itu masuk ke program kegiatan pengembangan destinasi wisata yang didalamnya termasuk ada pelatihan sdm dan lainnya.”

Penunjang utama pada sektor pariwisata khususnya desa wisata adalah sarana dan prasarana yang ada pada tempat wisata agar mampu menarik minat pengunjung untuk melakukan kunjungannya. Strategi pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata beberapa diantaranya yaitu perbaikan infrastruktur yang ada pada kawasan desa wisata di Kota Batu serta bimbingan atau pelatihan sumber daya manusia. Mengenai hal ini, Ibu Dhien Hisyam menambahkan:

“saat ini pemerintah Kota Batu fokus terhadap pengelolaan desa wisata, dengan dimulai dengan adanya pemetaan. Hal ini sesuai dengan visi misi Walikota yang baru yaitu Desa Berdaya Kota Berjaya. Jadi semuanya harus dimulai dari desa terlebih dahulu. Hasil dari pemetaan akan menjadi acuan kita untuk mengetahui desa wisata mana yang harus lebih diprioritaskan. Contohnya saat ini di Desa Wisata Oro-Oro Ombo yang sedang ramai dikunjungi oleh wisatawan khususnya di Coban Rais dan Batu Flower Gardennya. Program kita saat ini yaitu perbaikan infrastruktur jalan menuju objek wisata, selanjutnya yaitu penambahan atau perbaikan fasilitas di desa wisata tersebut, dalam hal ini seperti di Kampung Wisata Tani Temas, fasilitas-fasilitas di Kampung Wisata Kungkuk termasuk baru saja kami memperbaiki gazebo juga papan nama di Kampung Wisata Kungkuk agar lebih

menarik. Pihak dinas akan membantu penambahan dana untuk perbaikan fasilitas. Dan yang paling penting yaitu promosi desa wisata dan bimbingan pelatihan terhadap sdm-nya, yang mana juga harus sesuai dengan anggaran yang ada.” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).



Gambar 7. Papan Selamat Datang yang baru saja dibangun di Kampung Wisata Kungkuk
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Hal ini diperkuat oleh pernyataan pengunjung yaitu Ali Sadiqin tentang kondisi di salah satu desa wisata Kota Batu, Yaitu Desa Wisata Oro-Oro Ombo:

“saat ini daerah wisata Oro-Oro Ombo sudah mengalami peningkatan dibandingkan saat saya masih mahasiswa dulu. Sekarang sudah banyak penginapan-penginapan warga yang tentunya dengan harga lebih murah daripada hotel. Lalu sekarang semakin banyak spot-spot wisata yang ditemukan di desa ini dan saya lihat pengelolaannya sudah baik. Dulu saya hanya tahu Coban Rais di desa ini, itupun jalannya juga tidak sebagus sekarang. Sekarang ada Batu Flower Garden dan penangkaran kuda. Dulu pun untuk menuju spot wisatanya cukup sulit karena penunjuk jalannya minim, saat bertanya kepada warga kebanyakan hanya memberi tahu dengan asal-asalan sehingga dulu saya pernah

nyasar, maklum bukan asli sini. Tapi sekarang penunjuk jalannya cukup banyak jadi tidak bingung-bingung lagi” (Hasil wawancara pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 11.00 WIB di Kawasan Desa Wisata Oro-Oro Ombo).

Namun hal ini cukup berbeda dengan keadaan di Kampung Wisata Kungkuk. Hal ini dijelaskan oleh salah pengunjung yaitu Amalia Putri, seorang mahasiswi yang melakukan *camping* di desa tersebut:

“kondisi di Kampung Wisata Kungkuk sebenarnya sudah cukup nyaman, pemandangannya juga bagus, cocok untuk kegiatan *camping* dan *outbond*. Berbagai paket wisata disediakan disini dan pengunjung tinggal memilih saja. Tapi sayangnya beberapa fasilitas ada yang sudah rusak dan perlu diperbaiki seperti gazebo juga toilet yang saya tahu tadi beberapa ada yang tidak berfungsi. Tapi untuk hal lainnya, sudah cukup baik pengelolaannya” (Hasil wawancara pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 13.00 WIB di Kawasan Kampung Wisata Kungkuk).



Gambar 8. Gazebo yang tidak terawat di Kampung Wisata Kungkuk
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Terkait hal ini, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Punten yaitu Cahyono Hadi memberikan tanggapan:

“untuk beberapa gazebo dan pembangunan fisik lain memang masih belum dilakukan karena kami masih menunggu dari pihak Dinas Pariwisata untuk memberikan tambahan dana, yang rencananya akan terealisasi tahun depan. Anggaran dana desa sebenarnya ada, tapi untuk tahun lalu sampai saat ini sudah kami gunakan untuk penambahan area

wisata lain di Kampung Wisata Kungkuk seperti saat ini ada area petik mawar, kemudian pembangunan area wisata edukasi pertanian yang disitu ada pohon-pohon pinus yang kebetulan diantara pohon-pohon pinus itu dimanfaatkan oleh warga untuk bercocok tanam. Karena lokasinya berada di tempat wisata sehingga kami menggandeng warga untuk memberikan edukasi” (Hasil wawancara pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 13.30 WIB di Kawasan Kampung Wisata Kungkuk)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Batu sudah cukup bekerja keras untuk memberikan layanan yang baik guna kelangsungan pariwisata khususnya desa wisata yang ada di Kota Batu, diantaranya perbaikan jalan juga fasilitas-fasilitas di desa wisata, meskipun masih ada yang belum terlaksana seperti pembangunan fisik yang akan mulai dilakukan tahun depan.

c. Pengoptimalisasian Promosi Wisata

Penunjang strategi dalam pengelolaan yang baik adalah promosi yang membuat daerah atau tempat wisata yang ingin dikunjungi menjadi mudah untuk diketahui wisatawan. Promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, cetak, ataupun event-event yang dijadikan media untuk memperkenalkan potensi daerah.

Berkaitan dengan konsep pemasaran maka Kota Batu melalui Dinas Pariwisata telah fokus melakukan promosi dengan menggunakan acuan visi dari walikota yang baru yaitu “**Desa Berdaya Kota Berjaya**”. Sehingga saat ini memang lebih diutamakan promosi bagi desa wisata yang ada di kota Batu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama yaitu Ibu Caterina Diana mengenai promosi desa wisata di Kota Batu:

“banyak langkah yang sudah dilakukan terkait promosi desa wisata yaitu antara lain, ikut serta dan berpartisipasi dalam event yang

dilaksanakan oleh kementerian maupun provinsi dan aktif melakukan pameran ke luar. Yang kedua yaitu kerjasama dengan pemerintah maupun swasta. Kerjasama dengan pemerintah contohnya yang akan dilakukan di bulan april yaitu MTF (Majapahit Travel Fair) yang mengundang travel tingkat nasional serta luar negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dan promosi dilakukan melalui media sosial, selain itu ada pembentukan HPI (Himpunan Pemandu wisata Indonesia) yang dibentuk oleh ibu walikota. Promosi juga dilakukan lewat media sosial juga media cetak seperti koran” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Selain itu, terkait dengan prioritas promosi antara desa wisata dan objek wisata buatan, Ibu Caterina Diana menjelaskan:

“promosi tentang wisata di Kota Batu hampir semua pasti dipromosikan oleh Dinas Pariwisata, baik wisata buatan maupun desa wisata. Tapi saat ini lebih menitikberatkan kepada obyek wisata yg belum tereksplor dengan baik juga obyek-obyek wisata yang murni mengandalkan usaha dari masyarakat di tempat wisata tersebut seperti halnya desa wisata. Karena wisata buatan yang dikelola perusahaan tentunya sudah memiliki tim promosi sendiri, sedangkan desa wisata yang memberdayakan masyarakat sekitar masih perlu lebih dibantu tentang masalah promosi” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Selanjutnya, Ibu Caterina juga menjelaskan strategi promosi desa wisata yang akan mereka lakukan di tahun ini:

“strategi promosi dilakukan dengan sasaran dalam negeri maupun luar negeri dengan promosi membawa nama kota batu. Sasaran dalam negeri dengan dengan dilakukannya pameran maupun *roadshow* dengan membawa pengelola-pengelola desa wisata sehingga bisa menunjukkan potensi desanya masing-masing. *Roadshow* dilakukan dengan membidik suatu daerah atau provinsi lalu berkeliling di kota-kota yang ada disana. Pasar-pasarnya disesuaikan dengan mayoritas wisatawan yang berkunjung di Kota Batu. Misalnya banyak wisatawan dari Jawa Barat yang datang ke Batu, maka *roadshow* lebih diutamakan ke daerah Jawa Barat. Contohnya yaitu kampung wisata kungkuk sudah beberapa kali kita ajak ke dalam pameran dan *roadshow* serta membawa visitor dari kota lain ke Kampung Kungkuk. Bulan April akan ikut dalam MTF yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi, dan menjadikan Kota Batu sebagai tema tahun ini. Jadi dalam acara ini ada *seller* yaitu pengelola usaha wisata seperti

hotel, *travel agent*, dan lain-lain. Kemudian ada *buyer* yaitu biro perjalanan wisata dalam dan luar negeri. Karena temanya Kota Batu, maka pihak provinsi akan membawa tamunya ke Kota Batu dan Dinas Pariwisata akan membawa ke tempat-tempat wisata termasuk desa wisata. Kemudian bulan Mei nanti juga akan mengikuti pameran bertajuk Road Show Pariwisata Budaya di Lombok. Ini dilakukan untuk memperkuat citra Kota Batu sebagai kota wisata dan pertanian organik. Terutama, dalam mengenalkan wisata budayanya seperti desa wisata” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu)

Dari wawancara yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Batu terhadap desa wisata melalui media sosial, media cetak seperti koran, *event-event* atau *roadshow* yang selalu diagendakan tiap tahunnya. Namun berdasarkan pengamatan peneliti, disepanjang jalan menuju Kota Batu dan desa-desa wisata di Kota Batu belum ditemukan adanya banner atau media promosi lain agar pengguna jalan bisa mengetahui potensi desa wisata di Kota Batu. Peneliti hanya menemukan banner atau papan iklan wisata buatan di Kota Batu seperti *Batu Night Spectacular* (BNS), Jatim Park, dan wisata buatan lainnya. Selain itu untuk promosi di desa wisata Oro-Oro Ombo lebih menunjukkan tiap obyek wisatanya seperti Coban Rais, Batu Flower Garden, Penangkaran Kuda Megastar. Hal ini menyebabkan masyarakat juga wisatawan kurang mengetahui bahwa desa wisata Oro-Oro Ombo itu ada dengan produk unggulan sayurnya.

d. Dukungan Regulasi

Adanya dukungan regulasi dari pemerintah akan membantu dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, termasuk desa wisata. Regulasi berfungsi untuk mengatur secara pasti tentang beberapa hal mengenai

pariwisata, baik dari retribusi, pengelolaan, dan lain-lain mengenai pariwisata. Namun saat ini di Kota Batu, regulasi desa wisata masih tergolong lemah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Dhien Hisyam tentang regulasi yang ada dalam mengelola desa wisata yaitu:

“nah lemahnya disini yaitu regulasi. Hal ini karena desa wisata memang tergolong baru jika dibandingkan dengan obyek wisata lainnya, serta pemetaan desa-desa pun perlu persiapan juga harus menghasilkan data yang sesuai dengan potensi-potensi tiap desa yang mana desa di Batu cukup banyak. Namun saat ini sudah diupayakan yaitu dengan adanya Perda tentang Kepariwisata Nomor 1 Tahun 2013 dan sekarang sedang dilakukan pembahasan tentang RIPPDA. Untuk regulasi desa wisata memang belum ada, tapi sudah ada surat keputusan walikota tentang tim percepatan pengembangan desa wisata di tahun 2013, selanjutnya tinggal menyusun perda dan rippda” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan untuk dukungan regulasi terkait desa wisata masih belum ada, namun saat ini sudah ada surat keputusan Walikota tentang tim percepatan pengembangan desa wisata, sehingga Perda terkait desa wisata akan menyusul saat semuanya sudah terlaksana.

e. Kemitraan dengan Swasta

Salah satu strategi dalam pengelolaan desa wisata di Kota Batu adalah adanya hubungan kerja antara pemerintah Kota Batu dengan pihak pelaku usaha atau swasta. Dalam pengelolaan desa wisata di Kota Batu, Dinas Pariwisata Kota Batu tidak memungkiri kalau nantinya ada investor ingin melakukan investasi dalam proses pengelolaan desa wisata, apalagi saat ini Dinas Pariwisata fokus untuk melakukan promosi desa wisata. Hal ini sesuai

dengan wawancara dengan Ibu Dhien Hisyam selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata yaitu:

“kerjasama dengan pihak swasta tentunya ada tapi tidak semua pengelolaan desa wisata kita kerjasama dengan pihak swasta karena mungkin beberapa desa belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Contoh yang sudah ada kerjasama seperti di desa wisata Oro-oro Ombo ada Coban Rais, Batu Flower Garden, penangkaran Kuda Megastar, kami bekerja sama dengan seorang pengusaha bernama Pak Fendy.” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syaiful

Rochani selaku Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata:

“dari promosi-promosi yang dilakukan oleh bidang promosi, saat ini ada beberapa investor yang bersedia menjalin kemitraan dengan kami untuk pengelolaan desa wisata. Karena saat ini, tren wisata di Kota Batu sudah bergeser. Dulu wisatawan hanya sekedar mencari hiburan dengan berwisata seperti yang mereka lakukan di wisata-wisata buatan maupun obyek lainnya. Namun saat ini kebanyakan wisatawan lebih menyukai wisata yang menyediakan edukasi serta budaya dan kearifan lokal seperti yang ada di desa-desa wisata Kota Batu. Mereka ingin mendapatkan ilmu selain hanya melepas penat dengan berwisata. Hal itu yang menyebabkan pihak swasta seperti investor mulai melirik objek wisata seperti desa wisata. Memang saat ini belum semua desa wisata di Batu yang mana kami melakukan kerjasama dengan pihak swasta seperti di Desa Wisata Oro-Oro Ombo, Kampung Kelinci Bulukerto, dan Desa Wisata Songgokerto. Namun untuk kedepannya kami yakin dengan promosi yang dilakukan seperti *roadshow* yang nanti akan dilakukan di Lombok, akan menarik pihak swasta untuk melakukan kemitraan” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Hasil wawancara membuktikan bahwa kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan desa wisata di Kota Batu sudah dilakukan. Namun kemitraan tersebut belum mencakup semua desa wisata yang ada di Kota Batu. Dengan promosi dan pergeseran tren wisata membuat pihak Dinas Pariwisata yakin untuk kedepannya akan lebih banyak pihak swasta yang

bersedia melakukan kemitraan agar pengelolaan desa wisata lebih optimal dilakukan.

f. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Sumber daya manusia di sekitar kawasan pariwisata merupakan salah satu penentu bahwa kawasan wisata tersebut dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar. Khususnya di desa wisata yang ada di Kota Batu, dimana masyarakat desanya merupakan bagian dari wisata itu sendiri dengan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi. Meskipun saat ini desa-desa di Batu sudah masuk wilayah Kota Batu, namun masyarakat disana masih menjunjung tinggi norma adat dan agama. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa bersaing dengan daerah lain. Oleh karena itu Dinas Pariwisata Kota Batu berupaya memberikan bimbingan serta sosialisasi kepada masyarakat desa sebagai wujud pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Mustakim Wardi'i selaku Kepala Seksi Bimbingan dan Pelatihan, yaitu:

“pengembangan sdm pariwisata di desa wisata tentunya ada karena memang itu sudah wajib ada di program kegiatan dinas pariwisata. Contohnya di Kampung Kungkuk dan Wisata Tani Temas kita bekerja sama dengan dinas-dinas lain seperti dinas pertanian dan badan penanaman modal dengan mengembangkan usaha-usaha ekonomi pertanian. Jadi saat ini disana sudah cukup berhasil, lahan-lahan pertanian bukan hanya sebagai lahan pertanian saja, tetapi juga sebagai sarana wisatawan untuk wisata edukasi. Hasil dari pertaniannya menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan punya daya jual contohnya seperti di Wisata Tani Temas itu, mbak. Bidang kami juga sering melakukan bimbingan teknologi pengelola usaha akomodasi, serta dengan usaha travel” (Hasil wawancara pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Eliani Pristiningsih selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat, yaitu:

“di desa-desa wisata yang masyarakatnya menyediakan *homestay* contohnya seperti di Kungkuk dan oro-Oro Ombo, kita melakukan pemberdayaan ekonomi dari sisi akomodasinya. Program pemberdayaan ini bisa dibilang berhasil, dilihat dari saat ini kan makin banyak masyarakat yang desanya menjadi objek wisata berlomba-lomba untuk menjadikan rumahnya sebagai *homestay* atau mungkin mereka membangun bangunan baru untuk membuat *homestay*. Mereka telah dibekali pengetahuan bagaimana menyediakan kamar yang nyaman sesuai dengan standar dan bagaimana melayani tamu. Kemudian untuk pemberdayaan dari sisi pengelolaan objek wisatanya kami melakukan *sharing* atau diskusi bersama dengan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang anggotanya masyarakat desa itu sendiri. Jadi mereka juga sebagai perantara antara kami dengan masyarakat desa untuk pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Nah disini mbak pentingnya Pokdarwis itu, karena pada dasarnya Pokdarwis lebih tahu kebutuhan masyarakat dan kebutuhan desanya daripada pemerintah.” (Hasil wawancara pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Pernyataan dari pihak Dinas Pariwisata sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Abidin selaku pemilik salah satu *homestay* di Kampung Wisata Kungkuk, yaitu:

“dinas pariwisata sudah melakukan pemberdayaan untuk masyarakat di Desa Punten. Contohnya ya saya ini dan istri saya jadi tahu bagaimana mendirikan penginapan yang sesuai dengan standar. Kalau ada yang tidak kita tahu bisa langsung tanya sama Pokdarwis soalnya mereka cukup sering ketemu dengan pihak dinas. Lalu juga mereka pernah sosialisasi tentang caranya pemasaran lewat media sosial sama *website*. Sejauh kami memakai media sosial saja sudah cukup untuk penginapan” (Hasil wawancara pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 13.00 WIB di Kampung Wisata Kungkuk Kota Batu).

Tabel 4. Daftar Pokdarwis Desa Wisata Kota Batu

No	Nama Pokdarwis	Desa	Ketua
1	Gumilang	Kelurahan Ngaglik	Drs.M.Ali Aji, SH
2	Songgoriti	Kelurahan Songgokerto	Mishar
3	Desa Sidomulyo	Desa Sidomulyo	Yipta Mardianto
4	ORO-ORO OMBO	Desa Oro-Oro Ombo	Agus Priyanto
5	PANDERMAN	Desa Pesanggrahan	M. Fauzan
6	GEMPAR	Desa Pandanrejo	Warnan Tarmidzi
7	PESONA DESA	Desa Sumbergondo	Imam Maulidi
8	GIRI WISATA	Desa Giripurno	Yoyok Novalianto
9	Desa Punten	Desa Punten	Cahyono Hadi
10	PUNCAK ARJUNO	Desa Sumberbrantas	Yoyok Novalianto
11	GALUR RAKYAT	Desa Tlekung	Halinyoto
12	TORONGREJO	Desa Torongrejo	Agus Mardianto
13	MARGI REJO	Desa Pendem	Ruddy Kurniawan

Sumber: Printout Potensi Wisata, Dinas Pariwisata Kota Batu 2017

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya desa wisata dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di desa tersebut dan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat disana. Pihak pemerintah melalui Dinas Pariwisata berkontribusi dengan salah satu kegiatannya yaitu pengembangan sumber daya manusia pariwisata agar masyarakat di desa wisata bisa lebih mampu mengelola usahanya secara

mandiri dan mampu berinovasi untuk membuat desa mereka semakin menarik di mata wisatawan. Selain itu adanya Pokdarwis penting bagi setiap desa wisata karena Pokdarwis berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan termasuk desa wisata

2. Kontribusi Desa Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu

Pariwisata di setiap daerah apabila mampu dikelola dengan baik maka akan mendatangkan pendapatan tersendiri untuk daerah yang bersangkutan. Hal ini berlaku pula untuk desa wisata. Pemerintah Kota Batu yang saat ini beracuan pada visi walikota yang baru yaitu **“Desa Berdaya Kota Berjaya”** menjadikan desa wisata sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan mampu mendatangkan pendapatan untuk daerah selain untuk masyarakat desa itu sendiri. Seperti wawancara yang dilakukan bersama Ibu Dhien Hisyam selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Batu, yaitu:

“untuk kontribusi pendapatan dari desa wisata pasti ada yaitu dari Anggaran Pendapatan dari Desa dan pajak. Tapi pendapatan dari desa wisata untuk daerah tidak terlalu besar karena sebenarnya hasil dari produk desa wisata ya untuk masyarakat itu sendiri. Mereka yang mengelola ya mereka yang mendapatkan hasilnya. Apalagi untuk regulasi terkait desa wisata yang nantinya juga mencakup retribusi di kawasan desa wisata belum ada. Sayangnya untuk Dinas Pariwisata tidak memiliki data berhubungan dengan hal itu. Lebih jelasnya bisa minta langsung dengan pihak Badan Keuangan Daerah” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Roni selaku salah satu staf di Badan Keuangan Daerah, yaitu:

“jadi untuk desa wisata memang memberikan kontribusi untuk PAD melalui pajak. Karena hasil produk dari desa wisata itu hak masyarakat di desa itu, kita tidak berwenang. Untuk saat ini desa wisata masuk dalam kategori pajak hiburan permainan ketangkasan dan pajak pameran. Jadi masih belum kita sendirikan karena saat ini RIPPDA kan belum ada, dan dari dinas pariwisata masih melakukan pemetaan desa wisata. Nantinya ketika semuanya sudah selesai, pendapatan desa wisata melalui pajak akan kita bedakan jadi lebih jelas pajak apa saja yang masuk dari desa wisata” (Hasil wawancara pada tanggal 10 April 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu)

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kontribusi desa wisata untuk pendapatan asli daerah memang ada yaitu melalui pajak yang saat ini masih digolongkan masuk ke dalam pajak hiburan permainan ketangkasan dan pajak pameran. Hanya saja dibanding dengan objek wisata lain, pendapatan dari desa wisata untuk pendapatan daerah Kota Batu tidak terlalu besar karena pendapatan dari desa wisata tersebut merupakan hak masyarakat di desa wisata tersebut serta belum adanya regulasi tentang desa wisata yang mengatur masalah retribusi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu Kategori Pajak Hiburan Permainan Ketangkasan

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2013	Rp. 10.000.000,-	Rp. 1.207.912.795,-
2	2014	Rp. 10.000.000,-	Rp. 1.365.866.946,-
3	2015	Rp. 1.305.000.000,-	Rp. 1.598.522.249,-
4	2016	Rp. 2.079.859.600,-	Rp. 1.720.062.899,-
5	2017	Rp. 1.710.581.000,-	Rp. 1.710.755.782,-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Batu 2018

Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu Kategori Pajak Hiburan Pameran

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2013	Rp. 5.204.000.000,-	Rp. 3.509.374.251,-
2	2014	Rp. 5.824.000.000,-	Rp. 4.402.698.611,-
3	2015	Rp. 5.224.000.000,-	Rp. 5.697.844.110,-
4	2016	Rp. 7.142.886.400,-	Rp. 7.831.167.654,-
5	2017	Rp. 11.190.000.000,-	Rp. 12.293.100.254,-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Batu 2018

Meskipun tidak dapat dilihat seberapa besar kontribusi dari desa wisata terhadap pajak hiburan permainan ketangkasan dan pameran, tiap tahunnya realisasi pendapatan mengalami peningkatan. Namun di tahun 2016 tabel 2 tentang pajak permainan ketangkasan dapat dilihat bahwa realisasi dari pajak ini tidak memenuhi target karena pemerintah menyajikan target pendapatan yang terlalu tinggi. Sedangkan pada tabel 3 tentang pajak pameran tiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2013-2015 tidak mencapai target.

Obyek wisata yang menjadi obyek unggulan di tiap desa wisata untuk saat ini dapat dilihat dengan jelas seberapa besar pendapatan pajak dari objek tersebut terhadap pendapatan asli daerah. Contohnya seperti Coban Talun di desa wisata Tulungrejo, Coban Rais di desa wisata Oro-Oro Ombo, Wisata Paralayang di desa wisata Songgokerto. Meskipun disendirikan, obyek wisata tersebut tetap bagian dari desa wisata tersebut. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Roni, salah satu staf di badan Keuangan Daerah, yaitu:

“untuk sementara ini obyek-obyek wisata seperti Coban Rais, Coban Talun, Paralayang dan lainnya, nama badan usahanya masih sendiri-sendiri

di data pajak. Jadi belum bisa dijadikan satu dengan desa wisatanya karena obyek tersebut lebih dulu ada sebelum wacana desa wisata dan tim percepatan desa wisata mulai dibentuk. Tapi obyek-obyek wisata alam itu merupakan bagian dari desa wisata tersebut karena juga pengelolaannya tidak lepas dari masyarakat sekitar. Nah artinya obyek itu ya salah satu elemen pembentuk berdirinya desa wisata itu sendiri” (Hasil wawancara pada tanggal 10 April 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Data Pembayaran Obyek Pajak Hiburan 2016

No	Nama Pajak	Nama badan Usaha	Total Jumlah Pajak
1	Pameran	Coban Rais	Rp. 1.721.980,-
2	Permainan Ketangkasan	Coban Rais	Rp. 7.892.760,-
3	Pameran	Coban Talun	Rp. 22.578.520,-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Batu 2018

Tabel 8. Data Pembayaran Obyek Pajak Hiburan Tahun 2017

No	Nama Pajak	Nama badan Usaha	Total Jumlah Pajak
1	Permainan Ketangkasan	Coban Rais	Rp. 59.067.880,-
2	Pameran	Coban Rais	Rp. 135.023.420,-
3	Pameran	Coban Talun	Rp. 80.810.280,-
4	Pameran	Paralayang	Rp.10.373.300,-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Batu 2018

Tabel 4 dan 5 menunjukkan jumlah total pendapatan pajak hiburan permainan ketangkasan dan pameran, yang mana keduanya merupakan sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah Kota Batu. Apabila dihitung untuk tahun

2017 saja, jumlah total pajak hiburan permainan ketangkasan dari obyek wisata di desa wisata tersebut sebesar Rp. 59.067.880,- dan jumlah total pajak hiburan pameran sebesar Rp. 226.207.000,-. Sehingga apabila dihitung dengan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2017 pada tabel 2 dan 3, kontribusi desa wisata terhadap pendapatan asli daerah minimal sebesar 3,4% melalui pajak hiburan permainan ketangkasan dan minimal sebesar 1,8% melalui pajak hiburan pameran.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Strategi Pengelolaan Desa Wisata Kota Batu

Dalam pengelolaan suatu obyek pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, termasuk salah satunya yaitu desa wisata, tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Pengelolaan desa wisata terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang akan dikemukakan oleh penulis berdasarkan wawancara dengan narasumber di Dinas Pariwisata Kota Batu yaitu:

a. Faktor Pendukung

1) Letak Geografis Kota Batu

Wilayah Kota Batu terletak di dataran tinggi yaitu di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Lokasi tersebut menjadikan Kota Batu menjadi kota yang sejuk dengan pemandangan alam yang indah. Sehingga tiap wilayah di Kota Batu bisa dijadikan sebagai tempat wisata alam termasuk sebagai desa wisata dengan produk unggulan pertanian karena udaranya yang sejuk dan tanah yang subur. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Dhien Hisyam selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata yaitu:

“salah satu faktor pendukung pastinya dari letak geografisnya. Kota Batu kan memiliki udara sejuk serta cuaca dan kondisi alam yang mendukung. Apapun sebenarnya bisa dijadikan obyek daya tarik wisata seperti gunung yang bisa dikembangkan menjadi obyek wisata seperti Batu Flower Garden di Oro-Oro Ombo dengan tidak merusak lingkungan, serta desa-desa yang penuh dengan sawah bisa dijadikan desa wisata agro” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Caterina Diana selaku

Seksi Promosi dan Kerjasama yaitu:

“yang paling utama tentunya lokasi Kota Batu sendiri yang letaknya di lereng gunung ya. Udaranya sejuk dan jarang sekali panas kalau pas tidak macet. Tanah-tanahnya juga subur karena kan letaknya di kaki gunung. Apalagi kalau lewat jalur pujon akan disuguhi sama pemandangan gunung dan sungai, jadi pengunjung tidak merasa capek di perjalanan. Itulah kenapa saat ini kami fokus melakukan pengembangan desa wisata yang cocok dengan cuaca di Kota Batu ini dengan melihat faktor geografisnya” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan letak geografis dari Kota Batu menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan desa wisata. Lokasi yang berada di lereng gunung dan dataran tinggi membawa daya tarik terhadap wisatawan yang berkunjung sehingga pengelolaan desa wisata dapat dijalankan secara kontinu dengan mengunggulkan faktor geografis tersebut.

2) Tradisi Budaya yang Terjaga

Selain menyuguhkan kondisi alam pedesaan yang asri, faktor pendukung lainnya yaitu setiap desa wisata memiliki kearifan lokal akan kesenian budaya. Di Kota Batu ada 17 jenis kesenian mulai dari Bantengan, Pencak Silat Jaran Kepang, Sanduk, Reog, dan beberapa kesenian serta tradisi lain yang menyebar hampir diseluruh Desa/Kelurahan di Kota Batu. Kesenian

serta tradisi ini merupakan daya tarik yang unik bagi wisatawan, terutama wisatawan asing. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Ibu Caterina Diana selaku Seksi Promosi dan Kerjasama yaitu:

“hampir tiap desa wisata memiliki tradisi serta kesenian budaya lokal yang bisa dibawa keluar. Contohnya seperti bantengan yang diadakan di desa wisata Oro-Oro Ombo menuju gedung kesenian Mbatuaji. Saat itu cukup banyak wisatawan asing yang datang. Lalu di Kampung Kungkuk juga ada pagelaran tari tiap minggunya. Kemudian untuk tradisi lokal seperti tiap malam satu suro ada tradisi Ngudek Jenang di Candi Songgoriti itu letaknya di desa wisata Songgokerto. Nah kegiatan-kegiatan itu juga bisa sebagai sarana promosi bagi desa wisata.” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara Ibu Dhien

Hisyam selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata yaitu:

“tiap desa di Kota Batu punya tradisi lokal masing-masing dan itu menjadi ciri khas tiap desa. Yang paling populer itu bantengan. Tiap diadakan pasti ramai pengunjung. Selain itu di Kungkuk juga ada pertunjukan tari buat pengunjung, sudah masuk paket wisatanya. Seni budaya itu yang juga ingin kita lestarikan. Jadi desa wisata bukan melulu soal pertanian petik buah atau tempat outbond, tapi ada juga seni budaya lokal yang seringkali menarik wisatawan asing” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung dari pengelolaan desa wisata di Kota Batu adalah tradisi lokalnya yang masih dipertahankan. Desa wisata tidak berarti hanya menjual wisata alam dan sumber daya alam yang masih melimpah, tetapi juga tradisi lokal serta seni budaya sebagai daya tarik bagi wisatawan, khususnya wisatawan asing.

3) Keramahan Penduduk Desa Wisata

Sifat alami penduduk desa yang ramah terhadap orang asing maupun wisatawan menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan desa wisata di Kota Batu. Meskipun saat ini Batu telah menjadi sebuah kota, namun keramahan masyarakat di desa wisata saat berinteraksi dengan wisatawan tetap ada sehingga membuat wisatawan merasa nyaman saat mengunjungi obyek desa wisata di Kota Batu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Eliani Pristiningsih selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat di Dinas Pariwisata Kota Batu yaitu:

“untuk masalah bagaimana warga desa bersikap terhadap wisatawan sudah tidak perlu dilakukan bimbingan atau sosialisasi lagi. Berdasarkan pengamatan kita, karena pada dasarnya mereka masyarakat pedesaan ya, mereka selalu bersikap ramah kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Adat istiadatnya masih dijunjung tinggi sehingga semangat gotong royong dan saling menolong masih besar. Mungkin yang perlu ditingkatkan itu ya bimbingan terkait bagaimana mereka berinovasi mengembangkan desanya” (Hasil wawancara pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu)

Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan dari Amalia Putri, seorang mahasiswa yang melakukan *camping* di obyek Kampung Wisata Kungkuk yaitu:

“enaknya berwisata disini itu orangnya ramah-ramah mbak. Saya memang aslinya dari kota ya dan terbiasa dengan kehidupan perkotaan yang orangnya kadang ya cuek cuek saja. Tapi di Kampung Kungkuk ini penduduknya ramah-ramah dan sopan. Saat saya dan teman-teman menuju lokasi outbond mereka selalu menyapa. Kita jadi merasa nyaman disini. Lalu saat menuju Kampung Kungkuk kita sempat nyasar, saat kami tanya ke penduduk sekitar mereka memberitahu dengan sopan dan jelas” (Hasil wawancara pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 13.00 WIB di Kawasan Kampung Wisata Kungkuk).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, memang tidak semua penduduk di desa wisata Kota Batu memiliki sifat ramah. Namun

jumlahnya sangat sedikit dibandingkan mereka yang tetap mempertahankan sifat asli penduduk desa yang ramah terhadap wisatawan yang berkunjung. Selain itu keterbukaan informasi juga membuat peneliti mengalami kemudahan dalam melaksanakan wawancara. Dapat disimpulkan bahwa keramahan penduduk desa menjadi salah satu faktor pendukung pengelolaan desa wisata karena mereka tergolong siap dari segi sumber daya manusia dalam menyambut wisatawan yang datang ke desa wisata dengan sikap ramah dan sopan.

b. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Batu dalam pengelolaan obyek desa wisata meliputi:

1) Sarana Prasarana Kurang Memadai

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Batu menunjukkan bahwa pemerintah kurang siap dalam pembangunan sarana prasarana seperti jalan. Badan jalan yang kurang lebar terkadang kerap menimbulkan kemacetan saat musim liburan. Serta masih banyaknya jalan yang rusak dan sempit saat menuju area desa wisata yang rata-rata terletak di daerah pinggiran kota. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Dhien Hisyam selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata di Dinas Pariwisata Kota Batu yaitu:

“melihat makin banyaknya wisatawan yang datang kemari tiap tahunnya, sarana prasarana dikatakan belum mendukung karena dengan adanya wisata-wisata di kota batu maka akan menimbulkan macet. Mbak kan tahu sendiri kalo tempat wisata di Kota Batu tidak hanya

desa wisata saja. Jangan lupa ada Jatim Park, Selecta dan lainnya yang saat musim liburan pasti terjadi macet. Sehingga yang paling penting yaitu kesiapan infrastruktur seperti jalan” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak

Syaiful Rochani selaku Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata yaitu:

“yang kita sayangkan itu akses menuju beberapa desa wisata ada yang masih sempit dan rusak. Ada juga yang masih belum diaspal. Hal itu kan yang membuat pengunjung malas untuk datang kembali dan beberapa diantara mereka yang belum pernah datang ke desa wisata jadi menganggap kalau semua desa wisata jalannya pasti susah karena di desa. Oleh karena itu kita mengupayakan infrastruktur jalan yang memadai dengan bagian Sarana Prasarana. Selain itu pelebaran jalan juga penting mbak. Saat *High Season* akhir tahun kemarin itu macetnya luar biasa, bisa sampai berjam-jam. Itu kan juga bisa menjadi sebab wisatawan berpikir dua kali saat mau datang ke Batu apalagi desa wisatanya” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, kurangnya sarana dan parasarana seperti jalan menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan desa wisata yang dihadapi pihak Dinas Pariwisata, karena para pengunjung terkadang enggan untuk kembali ke obyek desa wisata tersebut dengan alasan jalan yang kurang memadai. Selain itu kondisi lalu lintas yang sering macet saat hari libur membuat para pengunjung berpikir dua kali untuk kembali berkunjung. Hal ini menjadi PR tambahan pihak Dinas Pariwisata agar segera mengatasinya.

2) Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Berinovasi

Hambatan lain yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam pengelolaan desa wisata yaitu kurangnya kesadaran masyarakat di desa wisata dalam berinovasi. Kebanyakan dari mereka cepat berpuas diri dengan keadaan di

desanya sehingga ketika ada lahan atau obyek yang berpotensi untuk dikembangkan hanya dibiarkan saja. Beberapa pihak dari desa wisata cenderung melimpahkan tugas untuk mengembangkan potensi desa termasuk promosi kepada Dinas Pariwisata. sikap berpuas diri tersebut menyebabkan banyaknya Pokdarwis di beberapa desa wisata mati suri. Selain itu beberapa desa belum memeperhatikan kebersihan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Caterina Diana selaku Seksi Promosi dan Kerjasama yaitu:

“saat ini belum sepenuhnya ada kesadaran dan kesiapan dari masyarakat lokal untuk menjadi tuan rumah kota wisata seperti bagaimana mereka berinovasi serta menciptakan lingkungan yang baik, aman, bersih dan kondusif. Beberapa desa wisata cepat berpuas diri sehingga potensi-potensi yang bisa dikembangkan dibiarkan saja. Lalu untuk masalah promosi ada beberapa desa yang melimpahkan sebagian urusan promosi kepada pihak dinas. Padahal kan kerjaan kita tidak hanya fokus pada satu desa itu” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara bersama Ibu Dhien Hisyam selaku Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata di Dinas Pariwisata Kota Batu yaitu:

“lemahnya mereka itu dalam urusan berinovasi, mereka cenderung malas dan menunggu pihak dinas yang bekerja lalu mereka ikut membantu, hal ini yang kadang menghambat proses pemetaan potensi yang sekarang sedang dilakukan. Dari pemetaan ini kita juga menemukan bahwa banyak Pokdarwis yang dulu sudah dibentuk sekarang malah mati suri. Tapi tidak semua desa wisata seperti itu ya. Lalu desa-desa wisata yang baru muncul kurang bisa menjaga kebersihan lingkungannya” (Hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu).

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, kurang siapnya masyarakat desa sebagai tuan rumah suatu kota tujuan wisata menjadi faktor

penghambat dalam pengelolaan desa wisata. Beberapa desa wisata cenderung cepat berpuas diri sehingga belum timbul kesadaran bahwa hal ini harus dipertahankan dan dilestarikan. Akibatnya beberapa Pokdarwis yang dulu dibentuk tidak menghasilkan suatu kegiatan yang berarti bahkan terkesan mati suri.

C. Analisis Data

1. Strategi Pengelolaan Desa Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kota Batu

Dinas Pariwisata Kota Batu yang memiliki tugas dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang berada di Kota Batu, saat ini berfokus pada pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang tersebar di Kota Batu. Beberapa contoh desa wisata yang ada di Kota Batu yaitu Kampung Wisata Kungkuk, Desa Wisata Oro-Oro Ombo, Desa Wisata Tulungrejo, dan yang lainnya. Selain menyuguhkan keindahan dan alam pedesaan yang asri, desa wisata juga dikenal akan keramahan penduduknya dan memiliki tradisi lokal yang masih terjaga sehingga menjadi ciri khas yang unik di tiap desa itu sendiri. Selain itu, tiap desa wisata juga memiliki produk unggulan seperti hasil pertanian buah, sayur, bunga hias, hingga kerajinan tangan. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Kota Batu berfokus pada pengelolaan desa wisata untuk meningkatkan minat pengunjung atau wisatawan terhadap desa wisata. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mengelola obyek desa wisata yaitu sebagai berikut.

a. Penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Biduan (2015:9) berpendapat bahwa Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pariwisata yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman pengembangan pariwisata bagi pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha. Adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengembangkan pariwisata agar dapat memberikan pelayanan-pelayanan yang baik bagi wisatawan yang datang untuk berkunjung. Pengelolaan desa wisata juga berpedoman pada dokumen ini sehingga nantinya proses pengelolaan dan pengembangan desa wisata bisa lebih terarah.

Namun untuk saat ini Dinas Pariwisata Kota Batu masih dalam tahap pembahasan untuk pembuatan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata. Meskipun masih dalam tahap pembahasan, Dinas Pariwisata Kota Batu telah melakukan persiapan terkait penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang nantinya juga mengakomodir tentang desa wisata. Beberapa diantaranya yaitu pemetaan potensi di tiap desa wisata, revitalisasi tim percepatan desa wisata, dan studi studi banding dengan daerah yang telah berhasil dengan pengelolaan desa wisatanya.

Pemetaan potensi desa wisata dilakukan pada 5 kelurahan dan 19 desa. Tujuan dari pemetaan potensi desa ini untuk mengelompokkan desa berdasarkan tiga kategori yaitu berpotensi, berkembang, dan maju. Berpotensi artinya Dinas Pariwisata masih perlu melakukan identifikasi terkait sumber daya dan daya tarik yang dimiliki oleh desa tersebut. Berkembang berarti desa tersebut sudah

melakukan implementasi dari potensi yang dimilikinya. Sedangkan maju berarti implementasi sudah dikembangkan dengan inovasi terkait produk yang dihasilkan, sumber daya manusia yang mampuni, manajemennya serta promosi yang dilakukan oleh desa tersebut. Selanjutnya yaitu revitalisasi tim percepatan desa wisata yang sudah diamanatkan melalui Surat Keputusan Walikota pada tahun 2013. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh tim percepatan ini yaitu pembinaan dan sosialisasi di seluruh desa/kelurahan dengan mengundang Kepala Desa, pengelola desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), juga perwakilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Selain itu juga dilakukan studi banding dengan daerah yang dikatakan telah berhasil dalam pengelolaan desa wisatanya seperti di Yogyakarta yaitu daerah Gunung Kidul.

b. Penyiapan Program atau Kegiatan Sesuai dengan Kebutuhan

Pemerintah Kota Batu yang dibantu oleh Dinas Pariwisata mencoba melakukan beberapa kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yang tinggal di desa wisata guna dalam membantu pengelolaan obyek pariwisata tersebut. Dalam beberapa kegiatan yang telah dicantumkan ada satu kegiatan yang bernama Program Pengembangan Destinasi Wisata tentang pengembangan obyek desa wisata dimana yang mengikuti pelatihan tersebut adalah anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari semua desa wisata di Kota Batu dimana kegiatan ini mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Hal ini sesuai dengan pendapat Biduan (2015:10) bahwa pengembangan pariwisata pada daerah destinasi wisata memerlukan anggaran

yang cukup besar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kelancaran aktifitas pariwisata pada suatu daerah destinasi dan kebutuhan daerah tersebut.

Ketersediaan dana dalam pengembangan pariwisata memang merupakan hal yang harus diperhitungkan. Penyediaan dana merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sarana prasarana pariwisata (Biduan. 2015:10). Namun ketersediaan dana bukanlah sebagai pedoman dalam melakukan suatu pembangunan demi memenuhi kebutuhan di desa wisata tersebut. Program kegiatan dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Batu berdasarkan kebutuhan yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan desa wisata. Dalam pembangunan sarana dan prasarana obyek desa wisata, Pemerintah Kota Batu telah melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan, juga pembangunan fasilitas pendukung seperti papan nama, juga pengembangan spot wisata di beberapa desa wisata. Namun hal ini belum dilakukan secara menyeluruh karena proses pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil pemetaan potensi desa wisata. Masih banyak ditemukan akses jalan menuju desa wisata yang belum memadai serta beberapa fasilitas seperti gazebo dan toilet kurang terawat dan mengalami kerusakan.

Namun dalam beberapa hal masih terdapat kekurangan, dimana pengelolaan dan pengembangan desa wisata tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat melihat ada banyak obyek desa wisata di Kota Batu. Ketika pihak pemerintah mulai fokus dengan pengembangan desa wisata yang lain, desa yang lebih dulu sudah terbentuk terkesan dibiarkan begitu saja dan dilimpahkan pengelolaannya kepada pihak Pokdarwis di desa wisata tersebut. Meskipun

pengelolaan desa wisata sebagian besar merupakan tanggung jawab masyarakat desa tersebut, namun masih perlu terus dipantau dan diawasi dalam pengelolaannya. Ketersediaan fasilitas pastinya harus terus dikembangkan dan dipantau perawatannya seiring dengan perkembangan wisata dan harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Hal ini juga mengakibatkan Pokdarwis di beberapa desa wisata yang sudah lama terbentuk menjadi mati suri karena kurangnya koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata yang mulai mengembangkan desa wisata lain dan kurang memantau perkembangan di desa wisata yang telah terbentuk.

c. **Pengoptimalisasian Promosi Pariwisata**

Kegiatan promosi pariwisata merupakan usaha untuk memperkenalkan produk pariwisata, yakni segala sesuatu yang ditawarkan baik obyek dan daya tarik wisata (Biduan, 2015:10). Hal ini berlaku pula untuk pengelolaan desa wisata yang mana tidak hanya berfokus pada satu obyek saja. Promosi desa wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Batu bertujuan memperkenalkan desa-desa wisata dengan berbagai keunikannya di Kota Batu. Dalam hal mempromosikan desa wisata di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu menyelenggarakan dan mengikuti beberapa *event* wisata seperti pameran dan *roadshow*. Selain itu pemerintah juga membuatkan *website* dan sosial media untuk beberapa desa wisata. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam industri pariwisata banyak memberikan manfaat bagi kegiatan promosi pariwisata (Biduan, 2015:10).

Promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam mempromosikan obyek desa wisata melalui penyelenggaraan *event* salah satunya yaitu dengan *roadshow*. *Roadshow* dilakukan dengan membidik suatu daerah atau provinsi, kemudian berkeliling di kota-kota yang ada di provinsi tersebut sebagai wujud promosi. Pasar dari *event* ini disesuaikan dengan mayoritas wisatawan yang berkunjung di Kota Batu. Pihak Dinas Pariwisata tentunya jugamengajak perwakilan dari beberapa desa wisata untuk mempromosikan potensi dan kekayaan desanya, salah satunya yaitu Kampung Wisata Kungkuk yang sudah beberapa kali diajak ke dalam pameran dan *roadshow*.

Selain *roadshow* Pemerintah Kota Batu juga mengikuti *event* yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah Pusat Provinsi Jawa Timur. *Event* ini disebut dengan MTF (Majapahit Travel Fair) yang diselenggrakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi, dan menjadikan Kota Batu sebagai tema tahun ini. Dalam pameran ini terjadi transaksi antara *seller* dan *buyer*, yang mana *seller* terdiri dari pengelola usaha wisata seperti hotel, travel agent, dari Kota Batu dan *buyer* yaitu biro perjalanan wisata dalam dan luar negeri. Dalam *event* ini pihak provinsi juga akan membawa tamunya ke Kota Batu dan Dinas Pariwisata akan membawa ke tempat-tempat wisata termasuk desa wisata yang saat ini merupakan fokus utama dari pengembangan wisata Kota Batu.

Bentuk promosi seperti ini akan dapat memperkenalkan obyek desa wisata secara lebih mendalam dalam skala nasional maupun internasional. Karena dalam beberapa *event* yang diadakan terdapat beberapa media elektronik luar negeri yang dilibatkan untuk meliput berita tentang *event* tersebut seperti contohnya pada

pameran MTF yang melibatkan pihak luar negeri. Dalam strategi pengelolaan obyek desa wisata Pemerintah Kota Batu selalu mengoptimalkan promosi dalam berbagai hal agar semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke desa wisata dan tidak hanya ke tempat wisata artifisial saja.

Promosi yang dilakukan melalui media cetak maupun elektronik juga diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat luas terhadap desa wisata yang ada di Kota Batu, sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang berwisata mengunjungi obyek desa wisata tersebut. Sesuai dengan keinginan Pemerintah Kota Batu yang menginginkan pengelolaan desa wisata dengan baik maka dibutuhkan penataan informasi data obyek desa-desa wisata agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, akurat dan dapat disebarluaskan dengan mudah serta dapat dijadikan referensi pariwisata.

Strategi promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam mengenalkan obyek desa wisata sudah cukup optimal. Berbagai *event* serta *roadshow* yang selalu dilakukan tiap tahunnya yang mengikutsertakan desa wisata mampu membuat tren wisata di Kota Batu mengalami pergeseran. Wisatawan yang tadinya hanya terpaku pada wisata buatan dan seperti *theme park*, kini mulai beralih pada wisata yang menghasilkan edukasi serta kearifan lokal dan budaya yang didapatkan dari desa wisata. Selain itu masyarakat juga membantu dalam mempromosikan desa wisata melalui foto-foto yang diunggah ke sosial media. Namun untuk promosi di jalan-jalan protokol masih belum dilakukan. *Banner-banner* serta papan promosi wisata di jalan masih belum ditemukan untuk

promosi desa wisata. Hingga saat ini papan promosi yang tersebar di seluruh Kota Batu masih tentang wisata artifisial atau buatan.

d. Dukungan Regulasi

Strategi selanjutnya guna mengelola obyek desa wisata adalah dengan adanya dukungan regulasi dari Pemerintah Kota Batu. Regulasi berfungsi untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan serta pengembangan pariwisata. Hal ini sesuai dengan pendapat Biduan (2015:11) yaitu regulasi merupakan suatu usaha dari instansi (pemerintah) yang telah diberi wewenang atau otoritas untuk mengatur aktifitas tertentu yang berada dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk dalam aktifitas kepariwisataan. Oleh karena itu, sesuai dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam urusan kepariwisataan di daerahnya, baik dalam pengembangan pariwisata maupun dukungan regulasi pariwisata yang ada di daerah.

Namun untuk saat ini pihak Pemerintah Kota Batu masih belum memiliki regulasi terkait desa wisata. Hal ini dikarenakan desa wisata termasuk obyek wisata yang cukup baru. Pengelolaan desa wisata mulai dilakukan ketika Surat Keputusan Walikota tentang tim percepatan pengembangan desa wisata pada tahun 2013. Sehingga masyarakat desa membuat peraturan sendiri terkait pengelolaan desanya. Tapi bukan berarti Pemerintah Kota Batu mengabaikan pentingnya regulasi untuk desa wisata. Sesuai dengan hasil wawancara regulasi tentang desa wisata akan segera dibentuk bersamaan dengan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Oleh karena itu untuk saat ini

regulasi tentang desa wisata mengikuti Peraturan Daerah tentang Kepariwisata Nomor 1 Tahun 2013.

Dukungan regulasi penting dalam pengelolaan suatu obyek wisata termasuk desa wisata, dimana regulasi digunakan sebagai acuan peraturan dalam menatanya. Pada obyek desa wisata juga berlaku demikian karena untuk saat ini dan masa mendatang pengunjung desa wisata akan mengalami peningkatan karena adanya pergeseran tren wisata.

e. Kemitraan dengan Swasta

Kemitraan dengan swasta dibutuhkan dalam pengelolaan obyek desa wisata agar tugas pemerintah dalam pengelolaan desa wisata bisa lebih terbantu sehingga pengelolaan desa wisata bisa lebih optimal. Pengembangan kepariwisataan mulai dari tingkat nasional bahkan sampai kepada tingkat daerah tidak terlepas dari tanggung jawab para pelaku industri kepariwisataan yang berperan di sektor swasta (Biduan, 2015:11). Swasta berlaku sebagai pihak yang langsung menangani dalam hal pengelolaan pariwisata di lapangan.

Dalam pengelolaan obyek desa wisata yang ada di Kota Batu, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan di beberapa desa. Hal ini berarti belum seluruh desa wisata terdapat campur tangan pihak swasta sehingga pengelolaan hanya antara pihak pemerintah dan masyarakat desa. Untuk desa wisata yang pengelolaannya sudah melakukan kerjasama dengan pihak swasta memang lebih dikenal oleh para wisatawan seperti desa wisata Oro-Oro Ombo yang terkenal dengan spot wisata Coban Rais yang saat ini dikembangkan dengan penambahan spot Batu *Flower Garden*. Kemudian desa wisata Tulungrejo yang

terkenal dengan spot wisata Coban Talun serta wisata petik buahnya, serta Kampung Kelinci Bulukerto. Pihak swasta dari desa wisata tersebut membantu dalam hal promosi sehingga obyek desa wisata bisa lebih dikenal. Namun bukan berarti tidak semua obyek desa wisata yang dalam pengelolaannya belum bekerjasama dengan pihak swasta tidak dikenal. Contohnya seperti Kampung Wisata Kungkuk saat ini menjadi tujuan destinasi kegiatan *outbond* dan *camping* serta wisata edukasi pedesaan. Sayangnya untuk desa wisata lain yang belum ada kerjasama dengan swasta masih belum terlalu dikenal dan pengunjung yang datang termasuk sedikit. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang bisa dimaklumi karena kebanyakan desa wisata mulai bermunculan dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Kota Batu selalu berusaha dalam melengkapi beberapa sarana dan prasarana di obyek desa wisata yang pengelolaannya belum bersama pihak swasta dengan dana yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Namun, pemerintah Kota Batu tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada kerjasama antara pihak swasta dalam pengelolaan obyek desa wisata yang belum ada campur tangan swasta dalam pengelolaan obyek desa wisata Kota Batu agar pengelolaan dan pengembangan desa wisata lebih optimal. Apalagi dengan adanya promosi dari pihak Dinas Pariwisata yang saat ini difokuskan untuk promosi desa wisata dan pergeseran tren pariwisata yang beralih kepada wisata edukasi pedesaan akan mendatangkan dan menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di desa tersebut.

Pada dasarnya kemitraan dengan swasta dibutuhkan dalam pengelolaan pariwisata termasuk desa wisata, dimana swasta berlaku sebagai penyedia pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dan fasilitas tentang pariwisata. Dari hasil

observasi dan wawancara yang dilakukan untuk kelengkapan fasilitas di beberapa desa memang sudah cukup terpenuhi, namun untuk perawatannya kurang diperhatikan sehingga beberapa fasilitas terkesan tidak terawat dan rusak. Hal inilah yang membuat kerjasama dengan pihak swasta cukup penting dalam pengelolaan desa wisata agar pengelolaan obyek desa wisata bisa lebih baik.

f. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dalam pengertian ini adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan di bidang kepariwisataan (Biduan, 2015:12). Dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia di desa wisata, Dinas Pariwisata Kota Batu berusaha membuat pelatihan-pelatihan atau bimbingan serta sosialisasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berada di desa wisata tersebut. Saat ini, masyarakat di desa wisata telah mendirikan *homestay*, berjualan untuk pemenuhan konsumsi wisatawan serta cinderamata baik yang telah memiliki tempat tetap ataupun pedagang kaki lima, mengembangkan beberapa area pertanian yang dikhususkan untuk wisata edukasi serta beberapa anggota Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) sebagai pengelola di tiap desa wisata.

Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya (Biduan, 2015:12). Hal

ini berlaku pula untuk pengelolaan di obyek desa wisata yang mana dalam pengembangannya melibatkan masyarakat desa itu sendiri dan sebagian besar dari masyarakat tersebut masih belum memiliki pengalaman yang cukup tentang menjadi bagian penting suatu obyek wisata. Oleh karena itu dalam pengelolaan desa wisata pemerintah mengharuskan pihak desa membentuk dan melibatkan Pokdarwis dalam menangani beberapa persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan desa wisata.

Dalam pengelolaan obyek desa wisata di Kota Batu telah dilakukan beberapa pelatihan oleh Dinas Pariwisata yang melibatkan masyarakat sekitar serta pihak dinas lain seperti Dinas Pertanian dan Badan Penanaman Modal terkait kiat dalam mengembangkan usaha-usaha ekonomi pertanian. Hal ini bertujuan agar lahan pertanian bukan hanya sebagai lahan pertanian saja, tetapi juga sebagai sarana bagi wisatawan untuk wisata edukasi. Lalu hasil dari pertaniannya menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan memiliki daya jual untuk masyarakat luas. Kemudian Bimbingan Teknologi juga sedang fokus dilakukan untuk pengelola usaha akomodasi seperti penginapan dan yang lainnya. Strategi terkait pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut berjalan baik mengingat sudah banyak masyarakat yang menjadikan lahannya sebagai wisata edukasi, peningkatan kualitas produk pertanian, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan promosi serta peningkatan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung.

2. Kontribusi Desa Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Desa wisata yang saat ini merupakan salah satu destinasi unggulan pariwisata di Kota Batu mendatangkan kontribusi bagi Pemerintah Kota Batu juga pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Menurut Biduan (2015:13) secara langsung dampak yang dirasakan daerah destinasi wisata adalah melalui pendapatan asli daerah. Pada umumnya obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah akan menarik retribusi bagi wisatawan yang berkunjung dan ingin menikmati obyek maupun daya tarik wisata beserta fasilitas yang ditawarkan. Pernyataan tersebut sesuai menurut pendapat Cohen dalam Suwena (2005: 110) dampak pariwisata antara lain:

- a. Dampak terhadap penerimaan devisa,
- b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat,
- c. Dampak terhadap kesempatan kerja
- d. Dampak terhadap harga-harga,
- e. Dampak terhadap kontribusi manfaat/keuntungan,
- f. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol,
- g. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya,
- h. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Sayangnya meskipun berkontribusi bagi pendapatan asli daerah, pendapatan dari desa wisata bagi pemasukan daerah tergolong rendah dibandingkan obyek wisata lain. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang retribusi di desa wisata. Sehingga pendapatan dari desa wisata untuk saat ini menjadi hak milik masyarakat desa seutuhnya. Oleh karena itu, pendapatan

dari desa wisata saat ini hanya melalui pajak hiburan yaitu pajak hiburan permainan ketangkasan dan pajak hiburan pameran, itupun hanya bagi desa wisata yang memiliki spot wisata yang sudah lebih dulu dikenal dibandingkan dengan desa itu sendiri. Untuk pajak hiburan permainan ketangkasan dan pajak hiburan pameran tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2013 sampai 2017, dimana tahun 2013 merupakan awal difokuskannya desa wisata sebagai destinasi wisata unggulan Kota Batu.

Meskipun belum bisa dilihat seberapa besar kontribusi dari desa wisata terhadap pendapatan asli daerah, kontribusi dari desa wisata dapat dilihat dari pendapatan pajak hiburan di desa wisata yang memiliki spot wisata yang sudah dikenal terlebih dulu. Beberapa diantaranya yaitu desa wisata Tulungrejo dengan wisata Coban Talun, desa wisata Oro-Oro Ombo dengan wisata Coban Rais, serta desa wisata Songgokerto dengan Wisata Paralayang. Meskipun dalam data pajak obyek wisata tersebut masih disendirikan, tapi obyek-obyek wisata tersebut merupakan bagian dari desa wisata tersebut dimana pengelolaannya masih melibatkan masyarakat sekitar dan Pokdarwis. Untuk tahun 2017 saja jumlah total pajak hiburan permainan ketangkasan dari obyek wisata di desa wisata tersebut sebesar Rp. 59.067.880,- dan jumlah total pajak hiburan pameran sebesar Rp. 226.207.000,-. Sehingga apabila dihitung dengan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2017 dengan jumlah Rp.1.720.062.899,- untuk pajak hiburan permainan ketangkasan dan Rp.12.293.100.254,- untuk pajak hiburan pameran, kontribusi desa wisata terhadap pendapatan asli daerah minimal sebesar 3,4%

melalui pajak hiburan permainan ketangkasan dan minimal sebesar 1,8% melalui pajak hiburan pameran.

Meskipun kontribusi desa wisata terhadap pendapatan asli daerah belum bisa dilihat secara keseluruhan karena tidak semua desa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah terkait belum adanya regulasi yang mengatur masalah retribusi, namun obyek desa wisata di Kota Batu telah menambah Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan telah menambah pemasukan bagi desa wisata itu sendiri serta masyarakat yang tinggal didalamnya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Strategi Pengelolaan Desa Wisata Kota Batu

Keberhasilan dari strategi tidak akan luput dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan antara faktor pendukung dan penghambat dari suatu strategi yang dilaksanakan oleh pihak terkait, begitu pula dalam strategi pengelolaan Desa Wisata di Kota Batu yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Berikut ini adalah faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Desa Wisata yang tersebar di Kota Batu:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung akan membantu dalam pengelolaan Desa Wisata di Kota Batu antara lain:

1) Letak Geografis Kota Batu

Wilayah Kota Batu terletak di dataran tinggi yaitu di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Lokasi tersebut menjadikan Kota Batu menjadi kota yang sejuk dengan

pemandangan alam yang indah. Sehingga tiap wilayah di Kota Batu bisa dijadikan sebagai tempat wisata alam termasuk sebagai desa wisata dengan produk unggulan pertanian karena udaranya yang sejuk dan tanah yang subur. Dengan kondisi iklim sejuk berbagai macam produk pertanian bisa dihasilkan disini seperti jeruk, apel, strawberry, juga berbagai macam tanaman dan bunga hias. Selain itu, Kota Batu juga menjadi jalur penghubung antara daerah Kediri, Jombang dan sekitarnya dengan Kota Malang membuat letaknya strategis. Keberadaan desa wisata yang tersebar di tiap wilayah Kota Batu menjadikan tempat singgah bagi mereka yang ingin beristirahat dengan nuansa wisata alam pedesaan yang sejuk dan indah.

Selain itu letak Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan membuat beberapa desa wisata memanfaatkan lahan di lereng pegunungan untuk mengembangkan area pertanian edukasi serta area permainan ketangkasan seperti *outbond* maupun wisata paralayang namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Meski promosi tetap dilakukan, karakteristik yang demikian membuat pengunjung semakin banyak yang datang ke desa wisata dengan kondisi alamnya yang masih asri serta masih banyak pepohonan dan tanaman hijau alami yang tidak bisa ditemukan di tempat wisata lainnya di Kota Batu.

2) Tradisi Budaya yang Terjaga

Desa wisata merupakan obyek wisata yang menyuguhkan keindahan alam pedesaannya, produk pertaniannya, serta keramahan penduduk desa membuat daya tarik sendiri bagi obyek wisata ini. Selain itu, setiap desa

wisata memiliki tradisi dan kesenian budaya yang masih dilestarikan. Di Kota Batu ada 17 jenis kesenian mulai dari Bantengan, Pencak Silat Jaran Kepang, Sanduk, Reog, dan beberapa kesenian serta tradisi lain yang menyebar hampir diseluruh Desa/Kelurahan di Kota Batu. Kesenian serta tradisi ini merupakan daya tarik yang unik bagi wisatawan, terutama wisatawan asing. Sehingga pengelolaan desa wisata tidak hanya mengenai area wisatanya saja, tetapi juga kesenian budaya yang harus tetap dilestarikan. Oleh karenanya pihak Dinas Pariwisata Kota Batu juga selalu melaksanakan event kesenian budaya dengan perwakilan tiap desa wisata untuk menunjukkan kesenian apa yang mereka punya. Hal ini juga sebagai ajang promosi untuk desa wisatanya masing-masing.

Selain kesenian budaya, tradisi masyarakat lokal juga masih dilestarikan seperti tradisi Ngudek Jenang di Desa Wisata Songgokerto yang tiap tahunnya selalu menarik pengunjung daerah lain untuk datang termasuk wisatawan asing yang tertarik dengan tradisi ini. Oleh karena itu meskipun Desa Wisata Songgokerto sebagian besar wilayahnya terdiri dari bangunan rumah dan terkenal dengan penginapannya yang murah, tetapi juga tetap memiliki tradisi lokal yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Sehingga dengan adanya tradisi lokal serta kesenian budaya yang masih terjaga membuat desa wisata memiliki pesona serta kekayaan tersendiri yang menarik minat pengunjung untuk datang.

3) Keramahan Penduduk Desa Wisata

Meskipun saat ini Batu telah menjadi sebuah kota, namun cerminan masyarakat desa masih terjaga seperti sifat ramah mereka. Selain itu masyarakat yang kental dengan adat jawa membuatnya semakin sopan santun dalam bertindak ataupun dalam berbicara. Budaya gotong royong dan saling menolong tercermin dari perlakuan ramah terhadap pengunjung. Keramahan masyarakat di desa wisata saat berinteraksi dengan wisatawan membuat wisatawan merasa nyaman saat mengunjungi obyek desa wisata di Kota Batu. Untuk melibatkan masyarakat sekitar, pemerintah mencoba untuk memberikan pelatihan terkait pengelolaan akomodasi desa wisata seperti pelatihan dalam pengelolaan *homestay* guna membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik untuk wisatawan.

Dalam hal ini berarti masyarakat membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan desa wisata. Masyarakat tidak lagi sebagai obyek melainkan sebagai aktor dalam pengelolaan potensi yang ada di desa wisata dengan peran menjaga keamanan, kebersihan, dan penyedia pelayanan ataupun jasa lainnya. Keramahan masyarakat inilah yang menunjang peran mereka sebagai tuan rumah di tiap desa wisata.

b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan strategi pengelolaan desa wisata ada beberapa penghambat yang diungkapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu yaitu:

1) Sarana Prasarana Kurang Memadai

Sarana prasarana atau infrastruktur seperti jalan merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah obyek wisata termasuk desa wisata. Namun saat ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang siap dalam pembangunan sarana prasarana seperti jalan. Badan jalan yang kurang lebar terkadang kerap menimbulkan kemacetan yang cukup parah saat musim liburan. Hal ini membuat wisatawan terkadang berpikir dua kali untuk datang saat musim liburan. Selain itu masih banyaknya jalan yang rusak dan sempit saat menuju area desa wisata yang rata-rata terletak di daerah pinggiran kota. Hal ini membuat kendaraan besar seperti mobil atau minibus sedikit kesusahan untuk mengaksesnya.

Hal tersebut membuat para pengunjung terkadang enggan untuk kembali ke obyek desa wisata tersebut dengan alasan jalan yang kurang memadai. Selain itu kondisi lalu lintas yang sering macet saat hari libur membuat para pengunjung berpikir dua kali untuk kembali berkunjung. Hal ini menjadi PR tambahan bagi pihak Dinas Pariwisata untuk menemukan cara lain menarik minat pengunjung agar datang ke desa wisata selain bekerja sama dengan pihak sarana prasarana untuk mempercepat pembangunan jalan.

2) Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Berinovasi

Meskipun masyarakat di desa wisata terkenal dengan keramahan dan saat ini sudah mampu memberikan pelayanan bagi wisatawan yang berkunjung dengan baik, hambatan lain yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam pengelolaan desa wisata yaitu kurangnya kesadaran masyarakat di desa wisata dalam berinovasi. Kebanyakan dari mereka cepat berpuas diri dengan

keadaan di desanya sehingga ketika ada lahan atau obyek yang berpotensi untuk dikembangkan hanya dibiarkan saja. Beberapa pihak dari desa wisata cenderung melimpahkan tugas untuk mengembangkan potensi desa termasuk promosi kepada Dinas Pariwisata. Sikap cepat berpuas diri tersebut menyebabkan banyaknya Pokdarwis di beberapa desa wisata mati suri. Selain itu beberapa desa belum memperhatikan kebersihan lingkungannya seperti pada saat musim ramai pengunjung dan tempat sampah yang masih minim.

Hal tersebut menunjukkan kurang siapnya masyarakat desa sebagai tuan rumah suatu kota tujuan wisata menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan desa wisata. Beberapa desa wisata cenderung cepat berpuas diri sehingga belum timbul kesadaran bahwa hal ini harus dipertahankan dan dilestarikan. Akibatnya beberapa Pokdarwis yang dulu dibentuk tidak menghasilkan suatu kegiatan yang berarti sehingga terkesan mati suri, sehingga pengelolaan desa wisata yang dulu sudah dibentuk menjadi tak terurus. Hal ini membuat pihak Dinas Pariwisata perlu bekerja dua kali untuk mengembangkan desa wisata itu lagi dan juga perlu pembentukan Kelompok Sadar Wisata lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama di lapangan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian baik wawancara, dokumentasi maupun observasi serta sesuai dengan data yang telah disajikan dan dibahas oleh peneliti tentang “Strategi Pengelolaan Desa Wisata dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Batu), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan desa wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu sudah cukup optimal dalam hal kesesuaian program dengan anggaran, promosi pariwisata, kemitraan dengan pihak swasta, dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Namun harus lebih memperhatikan hal-hal dasar dan penting yaitu pembentukan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata karena Kota Batu sendiri dikenal dengan kota wisata sehingga aneh apabila rencana induk tentang pengembangan pariwisata belum disusun, serta dukungan regulasi yang masih lemah untuk menangani dan mengatur obyek desa wisata mengingat saat ini fokus utama Pemerintah Kota Batu adalah pengembangan desa wisata.
2. Kontribusi terhadap desa wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu masih belum terlalu besar dibandingkan obyek wisata lain karena desa wisata

dibentuk oleh masyarakat dan hasil dari produk desa tersebut merupakan hak milik mereka. Selain itu belum adanya regulasi yang mengatur tentang retribusi di tiap desa wisata, membuat kontribusi desa wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya melalui pajak yaitu pajak hiburan permainan ketangkasan dan pajak hiburan pameran, dan hanya beberapa desa wisata yang menghasilkan pemasukan dari kategori pajak tersebut. Obyek desa wisata memberikan kontribusi minimal sebesar 3,4% melalui pajak hiburan permainan ketangkasan dan minimal sebesar 1,8% melalui pajak hiburan pameran.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Strategi Pengelolaan Desa Wisata Kota Batu
 - a. Faktor pendukung dalam strategi pengelolaan desa wisata di Kota Batu yaitu: yang pertama letak geografis Kota Batu yang berada di dataran tinggi sehingga menciptakan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah serta lokasinya yang strategis menghubungkan beberapa daerah dengan Kota Malang. Yang kedua tradisi dan kesenian budaya yang masih terjaga dan dilestarikan sehingga menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi tiap desa wisata. Yang ketiga yaitu keramahan penduduk desa wisata yang membuat pengunjung nyaman saat berwisata dan memudahkan pihak Dinas Pariwisata dalam mengadakan pelatihan-pelatihan.
 - b. Faktor penghambat dalam strategi pengelolaan desa wisata di Kota Batu yaitu: sarana prasarana yang kurang memadai seperti infrastruktur jalan

utama yang kurang lebar sehingga sering menimbulkan kemacetan saat musim liburan dan membuat wisatawan berpikir dua kali untuk berkunjung lagi. Faktor penghambat lain yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya sanitasi seperti pengelompokan sampah dan kurangnya kesadaran dalam berinovasi yang disebabkan oleh sifat masyarakat di beberapa desa wisata cepat berpuas diri dan menyerahkan masalah pengelolaan dan pengembangan desa wisata kepada pihak pemerintah, sehingga desa tersebut tidak berkembang.

B. Saran

Dalam mengelola desa wisata di Kota Batu masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Oleh sebab itu, adanya solusi agar pengelolaan pariwisata pada desa wisata yang ada di Kota Batu dapat optimal. Berikut ini beberapa saran yang diharapkan mampu membantu pengelolaan desa wisata agar berjalan baik yaitu:

1. Perlu adanya kerjasama dengan pihak sarana prasarana terkait dalam pelebaran bahu jalan agar kemacetan bisa dikurangi. Selain itu juga dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan disekitar desa wisata atau jalan menuju desa wisata yang masih rusak atau sempit agar pengunjung merasa nyaman dan tidak merasa malas untuk datang ke desa wisata.
2. Perlu diadakannya kesempatan bagi relawan untuk melakukan pemberdayaan manusia di desa wisata yang masih tergolong baru khususnya sosialisasi atau bimbingan terkait mengembangkan potensi desa serta mendorong dan membantu masyarakat desa untuk terus berinovasi agar tidak ada lagi desa wisata atau Pokdarwis yang mati suri.

3. Diadakan sosialisasi kepada masyarakat desa wisata untuk pengelolaan dan pengelompokan sampah dengan baik dan benar sesuai jenis sampahnya karena pada saat musim ramai pengunjung kebersihan desa kurang terjaga.



DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. 2006. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2012. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Publikasi Badan Pusat Statistik Jakarta: BPS.
- Biduan, Patris Gisau. 2015. *Strategi Pengelolaan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe*, e-journal, Vol. 1(4) 1-14.
- David, Fred R.. 2009. *Manajemen Strategis Konsep*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Dičevska, Snežana, dan Lidija Simončeska. 2012. *The Economic And Social Impact On Tourism Development*, e-journal, pp 272-280.
- Garrod, Brian. 2001. *Local Partisipasion In The Planning And Management Of Eco Tourism. A Rivised Model Approach*. Briston: University Of The West Of England.
- Hanafi, Imam, dan Tri Laksono Nugroho. 2009. *Kebijakan Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- I Wayan Pantiyasa. 2011. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal. Kota Denpasar. Tidak Diterbitkan (diunduh pada 15 Juli 2018, pada pukul 15.27 WIB).
- John, M. S, dan Jos Chathukulam. 2003. *Measuring Decentralisation: The Case of Kerala (India)*, e-journal, Vol. 23 pp. 347-360.
- Kamat, Smitha Bandare. 2011. *Exotic Village Tourism: Case Study of Saligao and Candolim*, International Journal of Hospitality & Tourism Systems, Vol. 4(1), pp 75-86.
- Kerr, William Revill. 2003. *Tourism Public Policy, and the Strategic Management of Failure*. London: Pergamon.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* edisi 3. Jakarta: Erlangga.

- Made Heny Urmila. 2013. *Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Jatiluwuh Tabanan Bali*. Jurnal kawistara vol 3 No. 2 Hal 117 – 226.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Mathew B. A, Michael Huberman, dan Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodakarya.
- Muluk, Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Pendit, N.S. 2002. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rangkuti, Freddy. 2004. *Analisis SWOT: Teknik Membedah kasus Bisnis*. Cetakan 11. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rondinelli, D. A. 2000. *Decentralisation, Territorial Power and the State: A Critical Response*, Jurnal Development and Change, Vol. 21 (pp.491-500)
- Salusu, J.. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Gramedia
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soebagyo. 2012. *Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia*. Jurnal liquidity 1(2). 153-158
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suwantoro, Gamal. 2001. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suwena, I Ketut, dan I Gst Ngr Widyatmaja. 2010. *Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Udayana University Press.

surabaya.tribunnews.com.

Tjiptoherijanto, P, dan Mandala Manurung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangan*. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Vazquez, Jorge Martinez, dan Paul Smoke. 2011. *Introduction Local Government Finance: The Challenges of the 21st Century*. Atlanta: Georgia State University.

Widjaja, H. A. W. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

www.indonesia.go.id diakses pada tanggal 7 November 2017 jam 15.10 WIB.

